

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45-075/Sekre.b/ 2020

Tentang
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45-073/Sekrt.b/2017
Nomor :050/169/Disdikpora-Bkt/Skt- 2016

Tentang
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
Tahun. 2016 – 2021



RENSTRA

2016 - 2021

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirant Allah SWT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016 – 2021. RENSTRA ini merupakan sebuah dokumen perencanaan pendidikan tingkat kota Bukittinggi yang bersifat menyeluruh, disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, mendapat masukan dari banyak pihak dengan partisipasi masyarakat.

Dalam era otonomi, proses penyusunan rencana harus mencerminkan semangat desentralisasi, pembaharuan dan kebersamaan. Sebagai sebuah dokumen yang utuh, RENSTRA ini tidak berdiri sendiri atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan tingkat kota. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan/pembangunan kota yang terkait dengan sektor-sektor lainnya.

Mudah-mudahan RENSTRA ini dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun program-program dan kegiatan setiap tahunnya. RENSTRA yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami memerlukan sumbang saran yang konstruktif yang dapat memberikan kesempurnaan, dan semoga lebih bermanfaat dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dunia pendidikan dan Kebudayaan

Atas partisipasi berbagai pihak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Agustus

2020

Kepala Dinas Pendidikan,
dan Kebudayaan
Kota Bukittinggi



Drs. MELFI, M.Si

NIP. 19660506 1986021005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGHANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum.....
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISDIKBUD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya DISDIKBUD
3. Kinerja Pelayanan DISDIKBUD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISDIKBUD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISDIKBUD..
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota	
4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kejian Lingkungan Hidup Strategis...	
5. Penentuan Isu-isu strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISDIKbud..	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan.....
Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan.....
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....
Tabel 2.4. Realisasi Anggaran 5 Tahun Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tabel 3.1. Perkembangan Angka Melek Huruf tahun 2013 s/d 2017 Kota Bukittinggi
Tabel 3.2. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan....
Tabel 3.3. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Disdikbud.....
Tabel 3.4. Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik.....
Tabel 3.5. Data Guru Sertifikasi PNS dan Non PNS Jenjang TK,SD,SMP Kota Bukittinggi
Tabel 3.6. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD
Tabel 3.7. Rekap Keadaan Akreditasi Kota Bukittinggi
Tabel 3.8. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Perpadu oleh Pemda Bukittinggi
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Sudirman No.9 Tlp/Fax. (0752) 35410 Bukittinggi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45-073/SKT.b/2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan walikota nomor 188.45.203-2020 tentang penyelarasan dan penyempurnaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Surat Keputusan walikota nomor 188.45.203-2020 tentang penyalarsan dan penyempurnaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 01 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BUKITTINGGI,


MELFI, M.Si

NIP.196605061986021005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dokumen rencana straregis merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. dalam rangka penyusunan rencana kerja (renja) SKPD setiap tahun yang disebut dengan pembangunan jangka pendek, kemudian dituangkan ke dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen rencana strategis pembangunan di bidang pendidikan dalam jangka 5 (lima) yang berisikan prioritas pembangunan dengan berdasarkan kepada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bukittinggi dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi periode 2016 – 2021. Dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, kemudian

memberikan manfaat kepada masyarakat, oleh karena itu perencanaan pendidikan membutuhkan konsistensi dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang harus diutamakan dalam melayani masyarakat untuk menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021 merupakan rencana lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Keberadaan RPJMD ini memiliki makna strategis karena menjadi Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, dan sebagai pedoman dan acuan bagi dokumen perencanaan di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dan kebudayaan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas pendidikan dan kebudayaan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2025
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021;
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
27. Surat Keputusan walikota nomor 188.45.203-2020 tentang penyesuaian dan penyempurnaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan arahan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan pengembangan kebudayaan di Bukittinggi selama lima tahun, untuk mendukung mewujudkan **Visi** dan **Misi** Kota Bukittinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016-2021.
- b. Sebagai pedoman bagi penyelenggara urusan pendidikan dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dalam menetapkan arah dan kebijakan sebagai dasar penentuan strategis dan prioritas program tahunan.
- c. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Disdikbud dan sistematika penulisan;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat informasi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISDIKBUD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah, Telaah Renstra kemendiknas dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan Isu Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN terdiri atas, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIIPENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok Disdikbud

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bukittinggi dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1.2. Fungsi Disdikbud

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingku tugasnya.
- Pelaksanaan administrasi Dinas
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Pendidikan
- Sekretaris
- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal
- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
- Kepala Bidang Kebudayaan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Perencanaan
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala seksi Kurikulum dan Penilaian
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
- Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan
- Kepala Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi
- Kepala Seksi Permusiuman
- Kepala Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah
- Kepala Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi

Tugas dan fungsi

1. Kepala Dinas
 - a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
 - (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
 - (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
 - (4) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.
 - (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas.
 - (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

- a. Mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset.
 - (2) Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
 - (3) Pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas.
 - (4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas.
 - (5) Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas.

- (6) Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas.
- (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibertikan oleh pimpinan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas : melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
 - (2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
 - (3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
 - (4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
 - (5) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah Dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan / penggandaan / pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumusan dan protokoler.
 - (6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan.
 - (7) Pengelolaan Asset di lingkungan Dinas.
 - (8) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja.

- (9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Perencanaan

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :Melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas.
 - (2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melakukan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - (3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
 - (4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas.
 - (5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas.
 - (6) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
 - (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- b. Menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan.
- (2) Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (3) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penetausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban.
- (4) Penyiapan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (5) Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas.
- (6) Pelaksanaan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan.
- (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal

- a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan program kerja bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

- (2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan saran prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
- (5) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (6) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (8) Pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Kurikulum dan penilaian

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas : menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum dan penilaian, evaluasi dan koordinasi di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja seksi kurikulum dan penilaian sesuai program kerja bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum mulatan local dan criteria penilaian pendidikan non formal.
- (4) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (6) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- a. Seksi ini mempunyai tugas : menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana, evaluasi dan koordinasi di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1). Penyusunan program kerja seksi kelembagaan dan sarana prasarana sesuai program kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

- (2) Penyusunan data informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (4) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (6) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

- a. Seksi ini mempunyai tugas : melaksanakan kebijakan teknis peserta didik dan pembangunan karakter, evaluasi serta koordinasi di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan program kerja seksi peserta didik dan pembangunan karakter sesuai program kerja bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
 - (2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta

didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

- (3) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (5) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- a. Bidang ini mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan program kerja bidang pembinaan pendidikan dasar sesuai renstra Dinas.
 - (2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan dasar.
 - (3) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
 - (4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (5) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (6) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.

- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidikan dasar.
- (8) Pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
- (9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Seksi Kurikulum dan Penilaian

- a. Seksi ini memiliki tugas : Melaksanakan, menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kurikulum dan penilaian, evaluasi serta koordinasi di bidang pendidikan dasar.
- b. Menyenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local dan criteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (4) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (5) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
 - (6) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (7) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

(8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- a. Seksi ini mempunyai tugas : Melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana, evaluasi, serta koordinasi di bidang pembinaan pendidikan dasar.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan program kerja seksi kelembagaan dan sarana prasarana sesuai program kerja bidang pembinaan pendidikan dasar.
 - 2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (4) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (6) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
 - (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter.

- a. Seksi ini mempunyai tugas : Melaksanakan kebijakan teknis peserta didik dan pembangunan karakter, evaluasi serta koordinasi di bidang pembinaan pendidikan dasar.

b. Menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan program kerja seksi peserta didik dan pembangunan karakter sesuai program kerja di bidang pendidikan dasar.
- (2) Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (4) Penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (5) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

14. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

- a. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1). Penyusunan program kerja bidang pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai renstra Dinas.

- (2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta pendataan dan teknologi informasi.
- (3). Penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta pendataan dan teknologi informasi.
- (4). Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu kependidikan serta pendataan dan teknologi informasi.
- (5). Penyusunan bahan pembinaan pendidikan serta tenaga pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pendataan dan teknologi informasi.
- (6). Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
- (7). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan serta pendataan dan teknologi informasi.
- (8). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (9). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

15. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pendidikan tenaga kependidikan, evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.

b. Menyelenggarakan fungsi :

- (1). Penyusunan program kerja seksi pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan program kerja bidang pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2). Menyusun data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan serta tenaga kependidikan.
- (3). Menyusun bahan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
- (4). Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan , pengelolaan kepangkatan dan angka kredit, penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5). Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7). Pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (8). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

16. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan

- a. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas: Melaksanakan perumusan kebijakan teknis peningkatan mutu pendidikan, evaluasi, koordinasi kebijakan teknis peningkatan mutu pendidikan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.

b. Menyelenggarakan fungsi :

- (1). Penyusunan program kerja seksi Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai program kerja bidang pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2). Penyusunan data dan informasi bidang perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan.
- (3). Menyusun bahan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
- (4). Pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5). Penyusunan bahan koordinasi , fasilitasi dan pelaksanaan pengukuran mutu satuan pendidikan terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan fasilitas pelaksanaan akreditasi.
- (6). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

17. Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi

- a. Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :
Melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan teknologi informasi, evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembina ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1). Penyusunan program kerja seksi pendataan dan teknologi informasi sesuai program kerja bidang pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3). Penyusunan bahan pembinaan pendataan dan teknologi informasi.
- (4). Pelaksanaan kajian dan analisis data pokok pendidikan serta fasilitasi kebutuhan data.
- (5). Pelaksanaan kajian dan analisa data pokok pendidikan serta fasilitasi kebutuhan data.
- (6). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendataan dan teknologi informasi.
- (7) Pelaporan pelaksanaan pendataan dan teknologi informasi.
- (8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

18. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Menyusun program kerja bidang kebudayaan sesuai renstra Dinas.
 - (2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
 - (3). Penyusunan bahan pembinaan di bidang kebudayaan.
 - (4). Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat penganutnya dalam daerah.
 - (5). Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah.

- (6). Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah.
- (7). Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah.
- (8). Penyusunan bahan pembinaan peninggalan sejarah.
- (9). Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya daerah.
- (10). Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah.
- (11). Penyusunan bahan pengelolaan museum daerah.
- (12). Penyusunan bahan fasilitasi di bidang kebudayaan.
- (13). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang kebudayaan.
- (14). Pelaporan bidang kebudayaan.
- (15). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

19. Seksi Permuseuman

- a. Seksi Permuseuman mempunyai tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis permuseuman , evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1). Penyusunan program kerja seksi permuseuman sesuai dengan program kerja di bidang kebudayaan.
 - (2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan permuseum.
 - (3). Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum.

- (4). Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang museum sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang permusiuman.
- (6). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

20. Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah

- a. Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah mempunyai tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis cagar budaya dan peninggalan sejarah, evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1). Penyusunan program kerja seksi cagar budaya dan peninggalan sejarah sesuai program kerja bidang kebudayaan.
 - (2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan cagar budaya dan peninggalan sejarah.
 - (3). Penyusunan bahan pelestarian cagar budaya dan peninggalan sejarah.
 - (4). Penyusunan bahan pembinaan bidang cagar budaya dan peninggalan sejarah.
 - (5). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi sub bidang cagar budaya dan peninggalan sejarah.
 - (6). Pelaporan sub bidang cagar budaya dan peninggalan sejarah.

- (7). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

21. Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi

- a. Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi mempunyai tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bina seni dan nilai tradisi sesuai program kerja serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- b. Menyelenggarakan fungsi :
 - (1). Penyusunan program kerja seksi bina seni dan nilai tradisi sesuai program kerja bidang kebudayaan.
 - (2). Penyusunan data dan informasi bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bina seni dan nilai tradisi.
 - (3). Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bina seni dan nilai tradisi.
 - (4). Pelaporan bina seni dan nilai tradisi.
 - (5). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

22. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- a. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit Pelaksanaan Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

23. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
Melaksanakan sebagai kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (1). Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - (2). Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
 - (3). Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
 - (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.Sumber Daya SKPD

Sumber Daya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dikelompokkan menjadi 2 (dua) 1. Sumber Daya Manusia, 2. Sumber Daya Materil. Sumber daya manusia berupa pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dan Sumber daya materil berupa peralatan penunjang untuk kelancaran bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Mei Tahun 2017 berjumlah 89 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang yaitu : Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Bidang Kebudayaan.

Susunan Kepegawaian dalam Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi didukung oleh Staf/pegawai dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Data dibawah ini akan menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi yang berdasarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel : 2.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON	JUMLAH
1	Kepala	1				1
2	Sekretariat		1	3	16	20
3	Bidang PAUD dan PNF		1	3	3	7
4	Bidang Pendidikan Dasar		1	3	11	15

NO	URAIAN	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON	JUMLAH
5	Bidang Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan		1	3	6	10
6	Bidang Kebudayaan		1	3	11	15
7	Pejabat Fungsional					
	a. Pengawas Sekolah				18	18
	b. Penilik Luar Sekolah				3	3
	J U M L A H	1	5	15	68	89

Sekretariat memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak dari pada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah adanya jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan penilik luar sekolah yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang lainnya. Kondisi kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel : 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

NO	URAIAN	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
----	--------	----	----	----	----	------	------	----	--------

NO	URAIAN	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kepala	1							1
2	Sekretariat	2	4	5	1	8			20
3	Bidang PAUD dan PNF	1	4			2			7
4	Bidang Pendidikan Dasar	4	6		1	4			15
5	Bidang Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan		6	1	1	2			10
6	Bidang Kebudayaan	1	9			4		1	15
7	Pejabat Fungsional								
	a. Pengawas Sekolah	6	12						18
	b. Penilik Luar Sekolah	1	2						3
	J U M L A H	16	43	6	3	20		1	89
	%	17,97	48,31	6,74	3,37	22,47		1,12	100

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 43 orang (48,31%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum.

2.2.2. Sumber Daya Material

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.010 meter persegi milik Pemerintah Kota Bukittinggi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 09 Bukittinggi. Secara umum kondisi sumber daya material atau sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sudah cukup tersedia untuk kelancaran tugas.

Lokasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lokasinya berhadapan dengan RS Strok Nasional dan berdampingan dengan TK Bhayangkari dan SMA N 2 Bukittinggi, sedangkan Kantor Pemerintahan lainnya agak berjauhan jaraknya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi kondisi ini memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

2.3.Kinerja Pelayanan SKPD

Penetapan prioritas pembangunan di bidang pendidikan didasarkan kepada potensi daerah baik secara geografis maupun kultural serta historis. Dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan terkini sasaran pendidikan yang akan ditetapkan harus lebih realistis dan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel. Demikian pula halnya dalam pengembangan pendidikan yang dilakukan, didasarkan pada kondisi riil pendidikan dengan mengacu pada tema pokok pendidikan yakni perluasan dan pemerataan pendidikan yang dikaitkan dengan pengelolaan dan tanggung jawab.

Kinerja pelayanan merupakan pencapaian yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kinerja pencapaian ini akan menjadi salah satu acuan dalam pencapaian visi dan misi Dinas. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase peningkatan kualitas guru PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%
	Persentase peningkatan kreativitas siswa PAUD	90%	90%	90%	100%	100%	90%	60%	60%	95%	95%	100%	67%	67%	95%	95%
	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana PAUD sesuai dengan standar nasional	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
	Implementasi pengembangan kurikulum PAUD	75%	75%	75%	100%	100%	75%	75%	75%	95%	95%	100%	100%	100%	95%	95%
2	Terbangunnya Sarana Pendidikan pada jenjang SMP	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6 Paket	6 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	6 paket	6 paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase siswa SMP yang memiliki Buku Laporan Hasil Belajar	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-
	Jumlah siswa yang mengikuti 4 Bidang Studi yang dilombakan dalam Pelaksanaan Olimpiade Sains SMP	100 Orang	80 orang	80 orang	1 paket	1 paket	80 Orang	28 orang	28 orang	1 paket	1 paket	80%	35%	35%	100%	100%
	Jumlah guru yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains SMP dan SMA	80 Orang	80 Orang	80 Orang	90 Orang	-	80 Orang	80 orang	80 orang	90 orang	-	100%	100%	100%	100%	-
	Persentase anak usia 7-15 tahun yang terlayani di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	95%	95%	95%	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase guru yang mempunyai kompetensi Pendidikan Dasar Terhadap jumlah murid	90%	90%	90%	-	-	90%	90%	90%	-	-	100%	100%	100%	-	-
	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sesuai dengan standar nasional	70%	70%	70%	53%	53%	70%	70%	70%	53%	53%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Angka putus sek olah	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase siswa yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi	99,95%	95%	95%	95%	95%	99,95%	90%	90%	95%	90%	100%	95%	95%	100%	95%
3	Persentase siswa SLTP yang berhasil lulus pada pelaksanaan Ujian Nasional	100%	100%	100%	95%	100%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	99%	99%	105%	100%
	Jumlah Cabang lomba yang dilaksanakan pada kegiatan FLS2N SMP	12 cabang	12 cabang	12 cabang	1 paket	1 paket	12 cabang	12 cabang	12 cabang	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase siswa yang lulus UN SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	Persentase Siswa SMK Yang Berhasil Memperoleh Sertifikat Kompetensi Keahlian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Siswa peserta 6 bidang Lomba Kompetensi Siswa SMK Yang dilaksanakan	40 Orang	20 orang	20 orang	18 orang	50 orang	28 Orang	12 orang	12 orang	18 orang	50 orang	70%	60%	60%	100%	100%
	Terbangunnya Sarana Pendidikan pada jenjang SMK	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	0	0	0	61%	100%	0%	0%	0%	61%	100%
	Terbangun dan terehabnya Ruang Kelas untuk pelengkap Sarana Pendidikan pada jenjang SMA	2 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	100%	6 Paket	2 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	100%	6 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase siswa SLTA (SMA, SMK) yang berhasil lulus pada pelaksanaan Ujian Nasional	100%	100%	100%	3769 orang	3724 orang	100%	100%	100%	3769 orang	3724 orang	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Siswa Yang mengikuti lomba Olimpiade pada 8 Bidang Studi yang dilombakan	80 siswa	80 siswa	80 siswa	225 org	225 org	0	0	0	225 orang	225 orang	0%	0%	0%	100%	100%
	Jumlah Siswa Kurang Mampu yang dibantu untuk mengikuti Bimbel Masuk Perguruan Tinggi	150 Siswa	700 Siswa	700 Siswa	150 Siswa	-	130 Siswa	700 siswa	700 siswa	150 siswa	-	87%	100%	100%	100%	-
	Jumlah Siswa Yang mengikuti 8 Cabang lomba yang dilaksanakan pada kegiatan FLS2N SMA	150 Siswa	150 Siswa	150 Siswa	17 Cabang	19 Cabang	0 Siswa	11 orang	11 Orang	17 cabang	19 cabang	0%	7%	7%	100%	100%
	Persentase siswa SMP kelas akhir yang terpantau kemampuan dan minat bakatnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penduduk berusia 15-44 tahun yang melek huruf	80%	80%	80%	99,94%	99,94%	80%	80%	80%	99,94%	99,94%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ada database penduduk yang buta aksara	0,09%	0,09%	0,09%	Ada	Ada	0,09%	0,09%	0,09%	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penduduk usia sekolah dasar mengikuti program Paket A	99%	99%	99%	90%	90%	99%	99%	99%	85%	85%	100%	100%	100%	94%	94%
	Persentase penduduk usia SLTP mengikuti program Paket B	95%	95%	95%	90%	90%	95%	95%	95%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penduduk usia SLTA mengikuti program paket C	75%	75%	75%	95%	95%	75%	75%	75%	90%	90%	100%	100%	100%	95%	95%
	Persentase siswa lulusan Paket A,B dan C yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi	82%	82%	82%	100%	100%	82%	82%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tutor program paket A,B dan C yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi standar nasional	85%	85%	85%	95%	95%	85%	85%	85%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase siswa Paket A,B dan C yang mengikuti ujian akhir dan lulus ujian kesetaraan	85%	85%	85%	95%	95%	85%	85%	85%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KBM yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar teknis pembelajaran	89%	89%	89%	90%	90%	89%	89%	89%	85%	85%	100%	100%	100%	94%	94%
	Persentase siswa putus sekolah dan pengangguran menjadi peserta didik dalam kursus /Pelatihan/kelompok belajar usaha/magang	75%	75%	75%	85%	85%	75%	75%	75%	80%	80%	100%	100%	100%	94%	94%
	Persentase peserta ujian kursus memperoleh ijazah/sertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/magang yang diperbaharui secara terus menerus	100%	100%	100%	Ada	Ada	100%	100%	100%	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase anak usia 7-15 tahun yang sekolah di SLB	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase guru yang mempunyai kompetensi Pendidikan Luar Biasa	75%	75%	75%	80%	80%	75%	75%	75%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan standar nasional	75%	75%	75%	60%	60%	75%	75%	75%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase tenaga pendidik yang sudah sertifikasi	90%	90%	90%	91%	91%	90%	90%	90%	91%	91%	100%	100%	100%	100%	100%
	Workshop dan diklat yang diikuti oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	69%	69%	69%	60 orang	100 orang	69%	69%	69%	60 orang	100 orang	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kelulusan siswa di ujian nasional	90%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kualifikasi penyelenggaraan sekolah yang berstandar nasional/International	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA, SMK untuk meningkatkan kompetensi dalam Wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran.	75 Orang	75 Orang	75 Orang	-	-	75 Orang	75 orang	75 orang	-	-	100%	100%	100%	-	-
	Jumlah sekolah menengah yang siap mengintegrasikan nilai aqidah ke dalam mata pelajaran	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	15 sekolah	100%	100%	100%	100%	100%

	Bertambahnya Jumlah Tenaga Pendidik yang memiliki kompetensi melakukan penulisan karya tulis ilmiah	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 Orang	100 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100 Orang	100 Orang	30%	3000%	100%	100%	100%
	Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi pada lomba di tingkat nasional	25 siswa.	25 siswa.	25 siswa.	138 siswa.	20 lomba	25 siswa.	25 siswa	25 siswa	138 siswa	20 lomba	100%	100%	100%	100%	100%
9	Adanya standar mutu pelayanan pendidikan disetiap tingkat pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Satuan Pendidikan Yang memiliki Dokumen Kurikulum Operasional (KTSP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase siswa yang memperoleh nilai terbaik dalam UN mendapat penghargaan	100%	100 orang	100 orang	100 orang	47 orang	100%	70 orang	70 orang	70 orang	47 orang	100%	70%	70%	70%	100%
	Meningkatkan jumlah Guru MIPA yang memiliki Kemampuan Bilingual	40 Orang	40 Orang	40 Orang	30%	-	40 Orang	0	0	30%	-	100%	0%	0%	100%	-
	Kerjasama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 kegiatan	1 kegiatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	50%	50%	100%	100%
10	Persentase peningkatan kualitas di bidang kepemudaan dan Olah Raga untuk meningkatkan kemampuan pemuda dibidang olah raga, kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan kesenian	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan	100%	100%	100%	50%	-	100%	100%	100%	50%	-	100%	100%	100%	100%	-
12	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Meningkatnya prestasi olah raga Jumlah cabang olahraga yang dilombakan dari cabang olahraga yang ada 6 Cabang 6 cabang 100%	15 Cabang	6 Cabang	6 Cabang	32 Cabang	19 Cabang	15 Cabang	6 cabang	6 cabang	29 cabang	19 cabang	100%	100%	100%	91%	100%
	Jumlah kejuaraan yang dimenangkan	6 Cabang	6 Cabang	6 Cabang	32 Cabang	12 Cabang	6 Cabang	2 cabang	2 cabang	25 cabang	12 cabang	100%	33%	33%	78%	100%
	Pembinaan Olahragawan berbakat	6 Cabang	6 Cabang	6 Cabang	-	-	6 Cabang	0	0	-	-	100%	0%	0%	-	-
14	Berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh aktifitas berolahraga	80%	80%	80%	85%	-	80%	80%	80%	70%	-	100%	100%	100%	82%	-

15	Meningkatnya profesionalisme guru melalui sertifikasi guru sebanyak 1232 orang	100%	1063 orang	1063 orang	95%	100%	100%	169 orang	169 orang	96,98%	100%	100%	16%	16%	102%	100%
16	Meningkatnya layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan program keahlian melalui akreditasi sekolah sebanyak 40 sekolah dan program keahlian	100%	100%	100%	45 sekolah	-	100%	100%	100%	15 sekolah	-	100%	100%	100%	33%	-
17	Diperolehnya profil pendidikan	100%	100%	100%	6 buku	1 buku	100%	100%	100%	6 buku	1 buku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tertatanya NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	100%	100%	100%	2344 orang	1 keg	100%	100%	100%	2344 orang	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	Tertatanya NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)	100%	100%	100%	33500 orang	1 keg	100%	100%	100%	33500 orang	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%
18	Melatih kemampuan ICT tenaga pendidik dan kependidikan	100%	100%	100%	75 orang	1 keg	0%	0%	0%	75 orang	1 keg	0%	0%	0%	100%	100%
19	Terbayarnya honor bulanan dan tunjangan kesejahteraan tahunan guru dan pendidik non PNS sebanyak 1232 orang	100%	1232 orang	1232 orang	1250 orang	100%	100%	1086 orang	1086 orang	1072 orang	100%	100%	88%	88%	86%	100%
20	Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas tergambar ada 20 sasaran dan 62 indikator sasaran dengan capaian target yang bervariasi, hal ini menggambarkan secara umum target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2011,2012,2013, 2014 dan 2015 hampir semua mencapai 100%, karena dalam pelaksanaan kegiatan tidak banyak ditemui kendala yang berarti. hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini merupakan sasaran yang meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada tahun 2011 Terdapat 4 indikator sasaran yang hasil capaian kinerjanya mencapai 100%, data ini menggambarkan pelayanan sangat baik, terutama terhadap peningkatan kualitas guru PAUD, peningkatan kreativitas siswa PAUD, ketersediaan sarana prasarana, dan implementasi pengembangan kurikulum PAUD. Pada tahun 2012 terdapat 3 indikator sasaran yang hasil capaian kinerjanya mencapai 100%, yaitu peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana belajar yang semakin memadai serta kurikulum selalu disempurnakan sesuai standar nasional. Pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai 89%, data ini menggambarkan pelayanan terhadap PAUD semakin baik, terutama terhadap kualitas guru, dan kurikulum selalu disempurnakan sesuai standar nasional. Pada tahun 2013, enam (6) lomba meraih juara 1 tingkat provinsi dan dua (2) lomba meraih juara II dan satu(1) lomba meraih juara III. Pada tahun 2014, 5 (lima) Program/kegiatan yang dilaksanakan dimana pada pelayanan anak usia dini Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini usia 3-6 tahun telah mencapai 84,6%, dan mendapatkan prestasi juara 1 lembaga PAUD Berprestasi tingkat provinsi (PAUD Exellent) dan 2 (dua) pendidik juara II di tingkat Provinsi. Pada tahun 2015, terdapat 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan termasuk kedalam program pendidikan anak usia dini.

Prestasi yang telah diperoleh tahun 2015 antara lain Juara I tingkat provinsi : 1) Apresiasi PTK PAUDNI, 2) Apresiasi LKP Berprestasi, 3) Hari Aksara Internasional untuk pengelola PKBM dan Stand terbaik meraih . Kemudian kejuaraan tingkat nasional yang telah di raih adalah 1) Apresiasi PTK PAUDNI harapan II. 2) Tutor Pendidikan Keaksaraan meraih harapan I. Dari data diatas dapat terlihat bahwa dari tahun ketahun prestasi PAUD semakin meningkat.

2. Pada Sasaran pelayanan bagi anak usia 7 – 15 sesuai target yang telah ditetapkan **pada tahun 2011** mencapai 100%. Keberhasilan tersebut karena ditunjang dengan upaya memaksimalkan pelaksanaan kegiatan terutama terhadap perencanaan yang tepat seperti dukungan, SDM dan dana yang memadai. **Pada tahun 2012** sasaran pelayanannya mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam tahun 2012 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK dari pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana SLTP mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan sarana prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai 100%, kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang dilombakan oleh provinsi dan nasional. Seperti juara 1 olimpiade sains SMP tingkat provinsi 4 orang kemudian terkirim ketingkat nasional, ada orang yang dapat meraih juara 1. Untuk non akademik FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) juara 1 tingkat provinsi, kemudian lomba LKS (Lomba Kopetensi Siswa) SMK juara 1 tingkat provinsi. Target yang telah ditetapkan pada **tahun 2013** mencapai 99%. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam tahun 2013 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK dari pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana SLTP mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan sarana prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai 100%,

kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang dilombakan oleh provinsi dan nasional. Seperti Olimpiade Saint, siswa SMP mewakili SUMBAR ketingkat nasional di bidang matematika . Untuk non akademik FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) 5 orang siswa mendapat medali perak di tingkat nasional,kemudian lomba OSN bidang Matematika guru SMPN8 mewakili SUMBAR ke tingkat nasional, Guru berprestasi mewakili SUMBAR ke tingkat nasional. **Pada tahun 2014** mencapai 99%. Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam tahun 2013 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK dari pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana SLTP mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan sarana prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai 100%, kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang dilombakan oleh provinsi dan nasional. Seperti Olimpiade Saint, siswa SMP mewakili SUMBAR ketingkat nasional di bidang matematika. **Pada tahun 2015** terdapat 7 indikator sasaran dimana sesuai target yang telah ditetapkan telah tercapai sebesar 100%. Kegiatan pada sasaran ini seperti Peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam tahun 2015 telah dilaksanakan baik melalui dana APBD maupun DAK dari pusat, tujuannya adalah untuk mencapai target sarana prasarana pendidikan wajib belajar sembilan tahun mencapai standar nasional pendidikan (SNP). Disamping pemenuhan sarana prasarana banyak prestasi yang diraih terutama nilai UN mencapai 100%, kemudian prestasi akademik maupun non akademik yang dilombakan oleh provinsi dan nasional. Seperti UN SD juara I tingkat provinsi, FLS2N Tingkat SD juara II, Guru Berprestasi,Kepala sekolah Berprestasi dan Pengawas Berprestasi tingkat nasional.

3. Bila dilihat dari sasaran meningkatnya perolehan hasil ujian sekolah dan ujian nasional dan berkembangnya kemampuan akademik peserta didik,

pada tahun 2011 hingga 2015 selalu mencapai 100%. Prestasi akademik yang diraih oleh siswa hal ini disebabkan salah satunya adalah kinerja guru semakin meningkat disamping sarana prasarana dilengkapi, tidak ditemui kendala selama tahun 2015.

4. Pada sasaran ke 4 yaitu terlaksanannya pelayanan pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, untuk tahun 2011-2012 terdapat dua capaian yang tidak mencapai 100%, untuk tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan hanya satu capaian yang tidak mencapai 100%, dan pada tahun 2015 semua capaian kinerja mencapai 100 %. Keberhasilan tersebut karena ditunjang dengan upaya memaksimalkan pelaksanaan kegiatan terutama terhadap perencanaan yang tepat seperti dukungan data, SDM dan dana yang memadai..
5. Sasaran ke lima yaitu meningkatnya perolehan hasil ujian sekolah dan ujian nasional dan berkembangnya kemampuan akademik peserta didik memiliki beberapa indikator sasaran, yang secara umum capaian indikator kinerja mencapai 100%, keberhasilan ini terlihat dengan prestasi lulus UN SD juara I tingkat provinsi dengan capaian kinerja 100%.
6. Pada sasaran 6, 7 dan 8 menggambarkan pelayanan terhadap pendidikan non formal. Pada tahun 2011,2012 dan 2013 kegiatan yang difokuskan adalah pelayanan pendidikan, pelaksanaan Ujian Nasional dan kegiatan-kegiatan penunjang kegiatan provinsi seperti pelaksanaan Jambore PTK-PNF (jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal), pameran HAI serta Proses Belajar untuk penduduk usia 15-44 melalui Paket A, B dan C yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan UPTD SKB. Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum tidak ditemui kendala yang berarti. Pada tahun 2014 dan 2015 kegiatan yang difokuskan adalah pelayanan pendidikan keaksaraan, kesetaraan, peningkatan mutu PTK PAUDNI, prosentase penduduk usia 15 tahun plus yang bisa baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun

plus di peroleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2014 telah mencapai realisasi 99,94 %, dan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C yang dilaksanakan pada UPTD SKB Kota Bukittinggi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah dilaksanakan persentase kelulusan 95% dari jumlah peserta yang ikut UNPK tahun 2014 dan 2015, kegiatan-kegiatan penunjang ke provinsi dan nasional seperti pelaksanaan Apresiasi PTK-PAUDNI (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal), pameran Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat Propinsi. Pada tahun 2014 prestasi yang diraih antara lain mendapat penghargaan dari Kemendikbud sebagai pengelola LKP terbaik nasional (LKP INGG) sebagai juara II, serta angka melek huruf tertinggi di Sumatera Barat. Pada tahun 2015 prestasi yang diraih antara lain mendapat penghargaan dari Kemendikbud sebagai pengelola Instruktur Kursusu Baby Sister terbaik (LKP INGG) sebagai juara I tingkat provinsi, serta angka melek huruf masih tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2015.

7. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang sesuai dengan standar nasional merupakan sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun 2011 capaian kinerja mencapai 80%, penyebab capaian kinerja 80%, ada satu kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yaitu kegiatan sekolah kembar Bukittinggi-Australia dimana aturan Permendagri nomor 11 Tahun 2011 membatasi jumlah kunjungan ke luar negeri. Pada tahun 2012 capaian kinerja mencapai 80%, penyebab capaian kinerja 80%, adalah efesiensi dalam anggaran. Pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai 94%. Pada sasaran ini prestasi yang diraih antara lain adalah terjalannya kerjasama dengan negara Malaysia jenjang SD dan menengah disamping 49 siswa SD,SMP,SMA dan SMK mendapatkan penghargaan atas prestasinya meraih nilai terbaik pada Ujian Nasional. Pada tahun 2014 capaian

kinerja mencapai 94%. Pada sasaran ini prestasi yang diraih antara lain adalah terjalannya kerjasama dengan negara Malaysia jenjang SD dan menengah disamping 49 siswa SD,SMP,SMA dan SMK mendapatkan penghargaan atas prestasinya meraih nilai terbaik pada Ujian Nasional. Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 100%. Pada sasaran ini prestasi yang diraih antara lain adalah terjalannya kerjasama dengan negara Malaysia jenjang SD dan menengah.

8. Pada sasaran 10, 11, 12, 13, 14 adalah sasaran kepemudaan dan keolahragaan capaian kinerja masing-masing dari tahun ketahun adalah hampir keseluruhannya mencapai 100%, sasaran ini adalah tentang ketersediaan sarana prasarana olahraga, lomba-lomba olahraga pembinaan olahragawan berbakat dan kepemudaan.
9. Pada sasaran 15 yaitu peningkatan profesionalisme guru. Pada tahun 2011-2015 capaian kinerja terhadap sasaran peningkatan profesionalisme guru semuanya mencapai 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sarannya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan profesional guru pada semua jenjang pendidikan.
10. Pada sasaran 16 yaitu peningkatan layanan pendidikan, dimana kegiatan akreditasi sekolah merupakan kegiatan pencapaian sasaran. Pada tahun 2011, capaian target kinerja mencapai 94%. Hal ini disebabkan karena ada dua kegiatan yang dianggarkan pada APBD perubahan tidak dapat dilaksanakan keterbatasan waktu. Pada tahun 2012 target kinerja mencapai 100%. Namun capaian realisasi dana mencapai 84%, hal ini disebabkan efesiensi anggaran,terdapat 11 kegiatan yang bersifat fasilitasi secara umum tidak ditemui kendala. Pada tahun 2013 target kinerja mencapai 15%. Namun capaian realisasi dana mencapai 8%, hal ini disebabkan adalah kuota yang direncanakan untuk 40 sekolah sementara yang bisa di akreditasi hanya 6 sekolah, sedangkan sisanya tidak bisa akreditasi dan diterbitkan sertifikatnya oleh BAP (badan Akreditasi

Provinsi). Pada tahun 2014 pada APBD Perubahan anggarannya dihapus karena tidak tepat untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan penganggaran yang ada tidak tepat untuk mendatangkan tim akreditasi nasional , sehingga kegiatan di tunda pelaksanaannya tahun 2015. Pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan 30 sekolah yang telah dilakukan akreditasi dengan anggaran sebesar Rp. 80.348.800,- dan terealisasi sebesar Rp.80.156.300,- (100%).

11. Sasaran 17 yaitu tersedianya data-data bidang pendidikan secara lengkap yang memiliki tiga indikator sasaran yang capaian kinerja pada tahun 2015 mencapai 100%. Pada sasaran ini mencakup tentang penyediaan data profil pendidikan, tertata NUPTK dan NISN yang merupakan data pokok pendidikan. Capaian kinerja mencapai 100% dan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemui kendala.
12. Pada sasaran 18, untuk sasaran tersedianya akses ICT untuk pengelolaan pendidikan, pada tahun 2011-2013 capaian kinerjanya hanya 0%, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dihapuskan pada Anggaran Perubahan. Namun pada tahun 2014 dan 2015, capaian kinerjanya mencapai 100% karena kegiatan tersebut telah terlaksana.
13. Peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik non PNS merupakan sasaran 19 yang akan dicapai melalui kegiatan tahun 2011-2015. Capaian kinerja pada tahun 2011 dan 2015 mencapai 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kegiatannya merupakan penyaluran honor bulanan dan tunjangan kesejahteraan tahunan guru dan pendidik non PNS. Namun pada tahun 2012, 2013, dan 2014, capaian kinerjanya hanya mencapai 86% dikarenakan jumlah orang yang dibayarkan honoranya kurang dari target awal yang ditetapkan.
14. Pada sasaran 20 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD, capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2015 mencapai 100% sesuai

15. dengan target yang telah ditetapkan. Pada sasaran ini kegiatannya adalah menyusun dokumen perencanaan, dan semua dokumen telah tersedia dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2011-2016 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.4

Realisasi Anggaran 5 tahun Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	17	18
-1	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Pendapatan	5.300.000.695	6.400.000.000	7.300.000.000	7.400.000.000	8.041.000.000	5.867.090.900	6.131.362.700	7.959.297.200	8.509.665.000	8.760.357.000	111%	96%	109%	115%	109%		
Belanja tidak Langsung	113,676,462,587	146,643,446,000	170,715,241,667	195,611,504,003	216,844,749,819	115,444,524,118	137,911,236,274	159,434,983,959	167,081,215,299	132,824,124,039	102%	94%	93%	85%	61%		
Belanja Langsung	43,809,422,055	38,086,605,428	47,112,750,303	45,340,726,930	52,804,759,682	28,898,791,202	25,594,879,977	34,956,245,758	40,963,303,967	20,211,233,370	66%	67%	74%	90%	38%		
Total	157,485,884,642	184,730,051,428	217,827,991,970	240,952,230,933	269,649,509,501	144,343,315,320	163,506,116,251	194,391,229,717	208,044,519,266	153,035,357,409	92%	89%	89%	86%	57%		

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Analisa dilakukan terhadap faktor-faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara efektif dan efisien.

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*strengths*)

- Tersedia Dukungan dari sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional
- Tersedia dukungan Sarana dan prasarana yang memadai
- Dukungan dan komitmen pimpinan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang berkualitas
- Dukungan/alokasi dana yang besar untuk pelaksanaan program kerja melalui, APBD dan APBN
- Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat
- Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat

- Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah cukup baik
- Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dari tahun- ketahun semakin meningkat;

2. *Kelemahan (Weaknesses)*

Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

- Dukungan tenaga teknis masih kurang, baik jumlah maupun kapasitasnya
- Tingkat pelayanan aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi masih perlu ditingkatkan
- Sarana dan Prasarana untuk pelayanan pendidikan perlu di tingkatkan lagi
- Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara
- Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, Dikdas, maupun Dikmen belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang kebudayaan
- Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap
- Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

1. *Peluang (Opportunities)*

- Tingkat kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan
- Dukungan stakeholder dan swasta dalam pengembangan pendidikan

- Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal
- Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi
- Antusias pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan berkarakter (berahlak mulia).
- Komitemen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah)
- Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang
- Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah
- Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- Potensi seni, budaya di Kota Bukittinggi cukup besar
- Banyaknya Cagar budaya di Kota Bukittinggi yang perlu dilestarikan

2. Ancaman (*Threats*)

- Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan dan kualitas pendidikan
- Era globalisasi menimbulkan pendidikan biaya tinggi
- Kemerosotan moral dan ahlak budi perkerja generasi muda peserta didik
- Aksesibilitas penyelenggraan pendidikan pada jenjang menengah masih belum merata
- Angka kemiskinan relatif tinggi
- Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah
- Terbatasnya kreator kebudayaan

-Adanya Tranformasi budaya

2.4.3 Strategi Analisa *Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Threat* (SWOT)

Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategi swot yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan dukungan masyarakat untuk pengembangan akses dan pelayanan pendidikan
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional dengan dukungan teknologi dan informasi guna peningkatan mutu, kualitas dan kesetaraan pelayanan pendidikan
3. Penggunaan alokasi dana yang cukup besar untuk perluasan akses pendidikan dan pembinaan lembaga pendidikan serta pembentukan karakter generasi bangsa.
4. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan
5. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan
6. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas
7. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
8. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
9. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal
10. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

11. Mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata seni/budaya dan obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya tarik wisata;

Sedangkan Strategi mengurangi kelemahan (*weaknesses*) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*Threats*), terlihat dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Gunakan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan integritas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemanfaat era globalisasi dan TI untuk pembentukan karakter generasi muda dan peserta didik
3. Pemanfaat era globalisasi dan TI dalam mensinergikan regulasi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
7. Meningkatkan daya tampung sekolah
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal
9. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan
10. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait kebudayaan
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal di bidang kebudayaan
12. Meningkatkan koordinasi antar lembaga tradisional
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebudayaan
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk di bidang kebudayaan

BAB III

ISI- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang

Untuk menggambarkan sejauh mana capaian dalam bidang pendidikan di Kota Bukittinggi digunakan berbagai indikator di bidang pendidikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter

Pada dasarnya perkembangan anak adalah mengembangkan pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja mempelajari aturan main disegala aspek yang ada, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter.

Untuk itu perlu adanya program dan kegiatan di bidang pendidikan dan Kebudayaan yang terkait pendidikan berkarakter tersebut.

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah diseluruh daerah , dengan demikian aksesibilitas diperlihatkan dari seberapa tinggi pencapaian APK/APM dan rata-rata lama sekolah. Target Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mengharapkan seluruh anak usia sekolah mesti tertampung melalui sistem pendidikan yang ada. Dalam arti kata semua anak usia sekolah di Bukittinggi harus sekolah.

c. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Kemampuan baca tulis (angka melek huruf) di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 99,58%.

Tabel 3.1

**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s.d 2019
kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Angka melek huruf	100	99.89	99,93	99,58

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada pendidikan dasar 9 tahun dapat dibagi 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs. Pada tabel dibawah ini dapat digambarkan partisipasi masyarakat mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 baik yang kelompok usia 7-12 tahun untuk SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun kelompok untuk SMP/MTs,

Jika dilihat perkembangannya angka partisipasi kasar Kota Bukittinggi melebihi 100%, hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah dari daerah lain yang bersekolah di Kota Bukittinggi, hal ini dapat diindikasikan sebagai telah terlayannya dengan baik penduduk usia sekolah kota Bukittinggi di semua jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Bukittinggi tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun 2016 s.d. 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI	17.822	18.097	17.011	17.139

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.864	13.071	13.111	13.444
1.3.	APK SD/MI	138.54	138.45	129.75	127.48
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	9.673	9.667	6.885	8.745
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.766	6.863	6.795	7.052
2.3.	APK SMP/MTs	142.97	140.85	101.32	124.01
3	TK/PAUD				
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan PAUD	8.397	8.328	8.217	6.345
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 3-6 tahun	7.966	7.865	8.359	9.971
3.3	APK TK/PAUD	94,86	94.43	98,3	63.63

e. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) SD/MI APM adalah angka partisipasi warga bukittinggi dalam tingkat pendidikan baik tingkat pendidikan Dasar dan Mengah, perkembangan angka partisipasi Murni ini untuk tingkat SD dan SMP masih ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya pada sekolah di

luar Bukittinggi. Terutama APM SMP banyak anak-anak yang melanjutkan ke Pesantren di luar kota Bukittinggi.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.3

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2016 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD / MI				
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	15.769	15.504	15.375	15.754
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.864	13.071	13.111	13.444
1.3.	APM SD / MI	122.58	118.61	117.27	117.18
2	SMP /MTs				
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.997	7.008	5.530	7.185
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.766	6.863	6.795	7.052
2.3.	APM SMP / MTs	118.20	102.12	81.38	101.89

- f. Masih belum memadainya sarana dan prasarana serta media Pembelajaran.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana pendidikan) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Usaha itu seperti pemberian Dana DAK untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, bantuan-bantuan rehabilitasi sekolah. Kondisi saat ini tentang bangunan sekolah adalah :

Tabel 3.4
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2016 s.d 2019 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik	31	34	34	37
2	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	59	59	60	62
3	Sekolah SD/MI Kondisi bangunan baik	53%	58%	57%	60%
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTS Kondisi bangunan baik	4	6	9	12
2	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTS	12	13	15	15
3	Sekolah SMP/MTS Kondisi bangunan baik	33%	46%	60%	80%
1	Jumlah sekolah pendidikan TK/RA Kondisi bangunan baik	44	45	47	50
2	Jumlah seluruh sekolah TK/RA	44	45	47	50

3	Sekolah TK/RA Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%
---	--	------	------	------	------

Kalau kita lihat perkembangan kondisi bangunan sekolah di Bukittinggi masih dalam capaian dibawah 80 %, mulai tahun 2016 pembangunan sekolah sudah di tingkatkan dan ditambah dana baik untuk pembangunan baru atau penambahan ruangan kelas serta ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang pertemuan lainnya.

g. APK PAUD

APK untuk jenjang pendidikan PAUD masih rendah, pada tahun 2016 56% namun target pada tahun 2019 menjadi 63,63 % untuk rentang umur 0 – 6 tahun.

h. Belum semua guru mempunyai sertifikat pendidik.

Secara keseluruhan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di kota Bukittinggi baru mencapai angka 41,6% untuk guru PAUD, 44,93 % untuk guru SD dan 61.83 % untuk guru SMP, maka akan menjadi salah satu tugas yang cukup berat untuk bisa mensertifikasi guru guru tersebut diatas 80 % pada akhir tahun 2021. Dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.5
DATA GURU SERTIFIKASI PNS DAN NON PNS JENJANG TK
SD SMP KOTA BUKITTINGGI

No.	Tingkat sekaolah	Guru Sertifikasi			Jumlah guru	Persentase
		PNS	Non PNS	Jumlah		
1	TK	29	93	122	293	41.64 %
2	SD	348	77	425	946	44.93 %
3	SMP	238	26	264	427	61.83 %

- i. Masih rendahnya kompetensi dan kualifikasi guru terutama guru PAUD dan Sekolah Dasar.

Masalah kualifikasi guru di kota Bukittinggi terutama untuk jenjang PAUD dan Tingkat Sekolah Dasar masih rendah begitu juga untuk masalah kompetensi guru masih harus lebih ditingkatkan agar mutu dan kualitas pembelajaran di tingkat PAUD dan sekolah dasar lebih meningkat pula. Kondisi tenaga Kependidikan PAUD adalah :

Jumlah Tenaga Kependidikan (guru) PAUD

Tabel 3.6

Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD

KECAMATAN	LK	PR	JML
GUGUK PANJANG	10	231	241
MANDIANGIN KOTO SELAYAN	6	155	161
AUR BIRUGO TIGO BALEH	4	155	159
TOTAL	20	541	561

- j. Akreditasi Sekolah.

Data status akreditasi sekolah dari jenjang SD sampai dengan sekolah menengah

Tabel 3.7

**REKAP KEADAAN AKREDITASI KOTA BUKITTINGGI
JENJANG DIKDAS TAHUN 2019**

No.	Tingkat sekolah	AKREDITASI (%)			Belum Akreditasi
		A	B	C	
1	TK	7	25	11	7
2	SD	47	10	3	5
3	SMP	8	4	3	-
4	PNF	2	15	23	32

Dari data diatas sampai sekarang terdapat sekolah yang sudah terakreditasi A untuk Tingkat SD 7 sekolah, dan Tingkat SMP 8 sekolah sedangkan selebihnya B dan ada satu sekolah yang C yaitu SD Trisula Perwari.

k. Pelestarian Cagar Budaya belum optimal

Pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Dalam rangka optimalisasi perlindungan Cagar Budaya maka dilakukan pendataan, penetapan dan pemeliharaan cagar budaya dalam rangka menuju Bukittinggi sebagai Kota Heritage, dipandang perlu peningkatan pemahaman stakeholder tentang pentingnya pelestarian cagar budaya di Kota Bukittinggi

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diadakan Registrasi Cagar Budaya dan Penetapan Cagar Budaya Kota Bukittinggi sebagai kekayaan budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya

yang telah diregistrasi dan ditetapkan kemudian dilakukan pemeliharaan dan perawatan, sehingga kelestariannya terus terjaga.

Jumlah cagar budaya yang dikelola oleh Pemda Bukittinggi adalah sbb:

Tabel 3.8

**Jumlah Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu
oleh pemerintahan KotaBukittinggi**

Kebudayaan		
No	Uraian	Lokasi
1	SMU Negeri 2 Bukittinggi	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi
2	Bangunan kantor Disdikbud kota bukittinggi	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi
3	Jam Gadang	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
4	SD Negeri 14 Bukit Cangang	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
5	Lobang Jepang	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
6	rumah dinas wakil walikota (sekarang rumah dinas sekda)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi

8	Benteng Fort de kock	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi
9	Cerobong Asap	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Bukittinggi
10	Lembaga Perasyarakatan Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi
11	Rumah kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi

1. Masih rendahnya pelestarian nilai tradisi dan seni budaya

Keberagaman budaya dan seni daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat mendapat perhatian dari semua pihak dan perlu didata serta dilestarikan sesuai amanat Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Untuk pelestarian nilai tradisi dan seni budaya ini dipandang sangat perlu melibatkan seluruh stakeholder terutama pelaku sejarah, pemangku adat dan pelaku/pratise seni dan budaya.

Berdasarkan pendataan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi belum semua seni dan budaya yang pernah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dilestarikan hal ini akan berdampak akan terjadi kehilangan jati anak bangsa khususnya masyarakat adat dan atau generasi muda Minangkabau, untuk itu perlu menjadi perhatian khusus pemerintah terutama

terhadap nilai –nilai yang mencerminkan karakter anak yang bernuansa lokal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Bukittinggi

Visi

**TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA,
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA
BERLANDASKAN NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Makna yang terkandung dalam visi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata diwilayah Indonesia bagian barat yg desemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yg religius, kegiatan perdagangan yg maju, alam yg indah, kuliner yg berkelas, tertata, bersih dan sehat**
- 2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi**
- 3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota bukittinggi mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dan sentral pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.**
- 4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai kewirausahaan yang berdaya saing tinggi**

5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Kalau kita melihat Visi Walikota Bukittinggi ada beberapa kata kunci (*key word*) yang menjadi perhatian diantaranya :

1. Kota Tujuan

Kota tujuan berarti kota sebagai destinasi utama, dalam arti kota yang menentukan, kota yang inspiratif, kota menjadi objek utama dari beberapa kota yang ada.

2. Pariwisata

Pariwisata berarti banyak tempat kunjungan atau tempat yang banyak memiliki objek wisata.

3. Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu kebutuhan utama dari manusia modern.

4. Kesehatan

Kesehatan dalam visi diatas dapat diartikan tempat untuk memperoleh pelayanan dibidang kesehatan yang lebih baik.

5. Perdagangan

Perdagangan dapat diartikan bahwa salah satu kegiatan utama perekonomian di Kota bukittinggi.

6. Jasa

Bidang jasa mencakup banyak hal yang dilayani di kota Bukittinggi.

7. Nilai Agama

Nilai agama merupakan salah satu patokan dalam keteraturan yang dinikmati oleh setiap warga kota dan pendatang.

8. Budaya

Merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kota Bukittinggi yang memakai **Adat basandisyarak dan syarak basandi kitabullah**, walau masyarakat Bukittinggi merupakan masyarakat heterogen.

Misi

Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdayaguna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan social masyarakat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi terkait Misi 3 yaitu Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan, (terkait Kebudayaan)

dan Misi 5 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan social masyarakat .

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Renstra Provinsi Sumatera barat

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra Kementerian Pendidikan merupakan penugasan RPJMN kepada Kemendikbud, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019 ialah **mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong**. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Untuk memitigasi hal ini, pemerintah menentukan kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. memperluas pendidikan menengah universal;

2. meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja;
3. meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter;

Telaah Renstra Propinsi Sumatera Barat

Dalam pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, dan akuntabilitas. Namun dalam aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah peningkatan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang masih menjadi kewenangan kota, dengan penuntasan pencapaian target Standar Nasional Pendidikan terhadap 8 standar. Sementara pendidikan tingkat SLTA yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga menjadi isu tersendiri terkait kualitas yang telah dicapai selama ini dan menjadi daya tarik mendapatkan layanan pendidikan di Bukittinggi.

Kualitas pendidikan di Bukittinggi selama ini juga sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi yang hingga tahun 2013 selalu yang tertinggi di Sumatera Barat bahkan termasuk 10 besar nasional. Namun semenjak tahun 2014, pemerintah melalui BPS melakukan perubahan formulasi penghitungan IPM, sehingga Bukittinggi berada di posisi kedua setelah Kota Padang. Ini merupakan isu strategis yang perlu disikapi, dimana variabel yang selama ini terkait dengan pendidikan berupa usia harapan sekolah cenderung lebih menguntungkan kota-kota besar dan ibukota provinsi, yang lebih banyak memiliki perguruan tinggi.

Pada isu strategis provinsi Sumatera barat, *Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama*, Kota Bukittinggi memiliki sejumlah tantangan pendidikan yang semakin sulit seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dengan pemberlakuan pasar bebas ASEAN yang menghadapkan SDM antar negara ASEAN dalam persaingan terbuka. Disamping tuntutan kualitas kinerja dan profesionalitasnya, karakter juga menjadi tantangan yang perlu diseriuskan, akibat dampak negatif budaya asing. Kecenderungan yang ditunjukkan dalam praktek kehidupan masyarakat, dampak negatif lebih berpengaruh ketimbang dampak positifnya. Dampak negatif tersebut berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan, diantaranya penerapan nilai-nilai agama dan adat yang cenderung menurun dan terdegradasi akibat pengaruh asing. Disamping itu upaya preventif dengan memperkuat budaya Minangkabau dengan filosofi Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah belum maksimal dilakukan, baik melalui dunia pendidikan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan karakter berbasis aqidah yang telah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi juga masih perlu ditingkatkan dan diperjelas konsep penerapannya. Begitu juga dengan penguatan kecerdasan secara berimbang antara kekuatan intelegensi, emosional dan spiritual yang sudah mulai diterapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Pengembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kependidikan, sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota. Salah satu indikator adalah dengan kontribusi sektor-sektor pendukung pendidikan dalam pengembangan Kota Bukittinggi. Melihat wilayah Kota Bukittinggi yang tidak terlalu besar maka tidak memaungkinkan untuk pengembangan Unit Sekolah Baru

(USB) namun kita dapat menambah pembangunan ruang belajar dan ruang guru. Ruang kepala sekolah, ruang pustaka dan lain-lain yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah. Pembangunan baru ini dapat dilakukan pada sekolah yang sudah ada baik itu di TK, SD dan SMP. Hal tersebut menandakan bahwa pengembangan kawasan perencanaan juga tidak terlepas dari pengembangan pendidikan walaupun tidak menambah Unit Sekolah Baru.

Keterbatasan ruang kota untuk memenuhi prasaran sekolah sesuai SNP (Standar Nasional Pendidikan), jadi perlu pembangunan sekolah secara vertikal.

3.5. Penentuan Isu -Isu Strategis

Permasalahan pokok pendidikan Kota Bukittinggi pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu :

- Dukungan tenaga teknis masih kurang, baik jumlah maupun kapasitasnya
- Masih kurangnya tenaga kependidikan yang handal untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Bukittinggi
- Tingkat pelayanan aparatur masih perlu ditingkatkan
- Sarana dan Prasarana untuk pelayanan pendidikan perlu di tingkatkan (disediakan)
- Kekurangan dana untuk operasional penyelenggaraan sekolah dan kegiatan yang berjenjang dari tingkat Kota sampai ke tingkat Pusat
- Kekurangan Tenaga atau Pegawai untuk melakukan pendataan, pengumpulan warisan budaya yang akan dilestarikan
- Masih kurangnya tenaga ahli tentang benda cagar budaya

Inilah permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan di Bukittinggi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT

DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, bersifat makro, dan dapat diwujudkan 5 tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dibutuhkan sasaran yang merupakan alat untuk pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran RPJPD.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalsikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Jadi tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yang hendak dicapai adalah :

“MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN BUDAYA”

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan
2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021, untuk menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera serta tidak mengesampingkan nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dimasyarakat.

Dibawah ini disajikan tabel 4.1 tentang Tujuan dan Sasaran satuan perangkat daerah dan tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama satuan perangkat daerah.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAE RAH

INDIKATOR KINERJA		PENJELESAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata rata lama sekolah	Rata rata lama sekolah	BPS	10.95	11.30	11.31	11.32	11.33	11.44
2	Harapan lama sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu	BPS	14.93	14.94	14.95	14.96	14.96	15

IV.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Disdikbud sesuai tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Keudayaan

INDIKATOR KINERJA		PENJELESAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	Jumlah satuan Pendidikan yang terakreditasi / jumlah satuan pendidikan yang ada	Dapodik	75%	80%	80%	85%	90%	90%
2	APK SD	Jumlah Siswa SD/MI (cls 1-6) / Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun X 100 %	Dapodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	APK SMP	Jumlah Siswa SMP/MTS (cls 7-9) / Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun X 100 %	Dapodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	APM SD	Jumlah siswa SD/MI Usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun X 100%	Dapodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	APM SMP	Jumlah siswa SMP/MTS Usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun X 100%	Dapodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	APK PAUD	Jumlah siswa usia 0-6 tahun /Jumlah penduduk usia 0-6 tahun 100 %	Dapodik PAUD	86%	86,50%	87,00%	87,50%	88%	88,50%
7	Rata rata nilai US SD	Rata rata nilai US SD	Hasil USSD	7,40	8,50	8,54	8,56	8,58	8,59
8	Rata rata nilai UN SMP	Rata rata nilai UN SMP	Hasil UN SMP	7.00	61,84	61,85	61,86	61,87	61,88
9	Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan Nasional	Hasil Lomba	200	30	35	40	45	50
10	Angka Putus sekolah	Persentase anak umur 7-15 Tahun yang tidak bersekolah	BPS	1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
11	Rata rata lama sekolah	Rata rata lama sekolah	BPS	10.95	11.30	11.31	11.32	11.33	11.44
12	Harapan lama sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu	BPS	14.93	14.94	14.95	14.96	14.96	15
13	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Jumlah pelestarian warisan budaya benda yang ditetapkan	Dapobud	25	27	29	31	33	35
14	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Jumlah pelestarian warisan budaya tak benda yang dicatatkan	Dapobud	1	1	1	1	1	2

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Setelah melakukan analisa visi, misi dan menetapkan sasaran dan indikator selama periode renstra, maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan. Melalui tolak ukur yang telah ditetapkan itu, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan.

a. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah
2. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
5. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
9. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan
10. Peningkatan Pengelolaan Seni Budaya dan Nilai Tradisi
11. Peningkatan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah
12. Peningkatan Pengelolaaan Permuseuman

b. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah
2. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah
3. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah
4. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD
6. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin
7. Meningkatkan peran serta masyarakat (dalam pendidikan)
8. Melakukan pemerataan sebaran siswa keseluruhan sekolah sesuai rayon / sistem online
9. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya
10. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya
11. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya
12. Memberikan bantuan pemugaran Cagar Budaya
13. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat
14. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian benda cagar budaya
15. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan benda cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah

Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Peningkatan Kualitas pendidikan dan budaya	Meningkatnya Akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah 2. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Peningkatan Kualitas	1. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah 2. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah	pendidikan dasar dan menengah
		4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 5. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	3. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah 4. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD
		1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan	1. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin 2. Meningkatkan peran serta masyarakat (dewan pendidikan) 3. Melakukan pemerataan sebaran siswa keseluruhan sekolah sesuai rayon /sistim on line
2.	Meningkatnya Pelestarian Warisan	1. Peningkatan Pengelolaan Cagar	1. Meningkatkan koordinasi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Budaya	Budaya dan Peninggalan Sejarah 2. Peningkatan Pengelolaan Permuseuman	fasiltasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya 2. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya 3. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya 4. Memberikan bantuan pemugaran Cagar Budaya 5. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat 6. Meningkatkan kerjasaman dengan balai pelestarian benda cagar budaya 7. Pemugaran dan pembangunan kembangan bangunan benda cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Setelah melakukan analisa visi, misi dan menetapkan sasaran dan indikator selama periode renstra, maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan. Melalui tolak ukur yang telah ditetapkan itu, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan.

a. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah
2. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
8. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
9. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
9. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan
13. Peningkatan Pengelolaan Seni Budaya dan Nilai Tradisi
14. Peningkatan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah
15. Peningkatan Pengelolaan Permuseuman

b. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

16. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah
17. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah
18. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah
19. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah
20. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD
21. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin
22. Meningkatkan peran serta masyarakat (dewan pendidikan)
23. Melakukan pemerataan sebaran siswa keseluruhan sekolah sesuai rayon / sistim on line
24. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya
25. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya
26. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya

27. Memberikan bantuan pemugaran Cagar Budaya
28. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat
29. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian benda cagar budaya
30. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan benda cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah

Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3. Peningkatan Kualitas pendidikan dan budaya	Meningkatnya Akses dan kualitas layanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah 2. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah 7. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 8. Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 9. Peningkatan Kualitas Pembelajaran di 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah 9. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat pendidikan dasar dan menengah 10. Meningkatkan pemahaman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	masyarakat tentang PAUD
		1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan	1. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin 2. Meningkatkan peran serta masyarakat (dewanpendidikan) 3. Melakukan pemerataan sebaran siswa keseluruhan sekolah sesuai rayon /sistim on line
4.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	3. Peningkatan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah 4. Peningkatan Pengelolaan Permuseuman	8. Meningkatkan koordinasi dan fasiltasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya 9. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya 10. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya 11. Memberikan bantuan pemugaran Cagar Budaya 12. Memberikan insentif terhadap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>pembangunan rumah adat</p> <p>13. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian benda cagar budaya</p> <p>14. Pemugaran dan pembangunan kembang libangunan benda cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus. Secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan, sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu :

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal yang penting yang harus dilakukan agar program tersebut dapat menunjang terlaksanannya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut diatas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga/masyarakat

yang dikoordinasikan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kinerja pendidikan Kota Bukittinggi pada masa lalu relatif sudah baik, namun tantangan kedepan juga tidak ringan. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan pemerintah kabupaten kota tidak lagi berwenang dalam mengelola Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karena harus diserahkan ke pemerintah provinsi, efektif tahun 2017. Selama ini penyelenggaraan pendidikan SLTA termasuk unggulan Bukittinggi yang telah mengukir berbagai prestasi dan memperoleh berbagai penghargaan.

Dalam kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mengalami perubahan program kegiatan. Mulai tahun 2017 SOTK Dinas Pendidikan berubah yang sebelumnya bernama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kemudian diganti menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi).

Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan pendanaan yang dibutuhkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2016 – 2021) sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							target	Rp	target		target		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	
1	Peningkatan kualitas pendidikan dan budaya	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan pendidikan	Persentase saruan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 standar pendidikan nasional)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				8.914.026.314		12.516.203.111,00		30.438.686.365		26.589.079.137		22.378.567.050		19.862.346.805		120.698.908.782	Disdikbud
			APK SD APK SMP APM SD APM SMP	Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP			1 keg 37.080.000		1 keg 38.710.000,00		1 keg 38.709.900		1 keg 42.580.890		1 keg 46.838.979		1 keg 51.522.877		255.442.646	Disdikbud	
				Olimpiade Sains Nasional Jenjang SLTP	Tersedianya nilai-nilai hasil Ujian Nasional SLTP Kota Bukittinggi		1 keg 82.375.000		1 keg 73.375.000,00		1 keg 73.357.000		1 keg 80.692.700		1 keg 88.761.970		1 keg 97.638.167		496.199.837	Disdikbud	
				Lomba Usaha Kesehatan Sekolah			1 keg 3.955.400		1 keg 41.820.000		1 keg 50.000.000		1 keg 55.000.000		1 keg 60.500.000		1 keg 66.550.000		277.825.400	Disdikbud	
				Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlet ke Tingkat Propinsi dan Nasional			1 keg		1 keg 285.057.800,00		1 keg 350.000.000		1 keg 385.000.000		1 keg 423.500.000		1 keg 465.850.000		1.909.407.800	Disdikbud	
				Penyelenggaraan UAS SD / MI / SDLB	Terpilihnya calon peserta didik baru kota Bukittinggi		1 keg 44.542.950		1 keg 150.000.000,00		1 keg 150.000.000		1 keg 165.000.000		1 keg 181.500.000		1 keg 199.650.000		890.692.950	Disdikbud	
				Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang			1 keg		1 keg 119.999.900,00		1 keg 119.999.900		1 keg 131.999.890		1 keg 145.199.879		1 keg 159.719.867		676.919.436		

VI - 97	<i>Renstra Disdikbud 2016-2021</i>
---------	------------------------------------

VI - Renstra Disdikbud 2016 -
98 2021

				Penyeleng araan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Termotifas inya guru Untuk meningkat kan Prestasi	12 bln	58.540.000	12 bln	18.790.248,0 0	12 bln	18.790.248,00	12 bln	20.669.273	12 bln	22.736.200	12 bln	25.009.820		164.535.789	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancan	Terlaksana nya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	12 bln	27.000.000	12 bln	18.235.000,0 0	12 bln	18.235.000,00	12 bln	20.058.500	12 bln	22.064.350	12 bln	24.270.785		129.863.635	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 14 Tanjung Alam	Terlaksana nya entri data siswa miskin	12 bln	119.251.040	12 bln	20.665.199,0 0	12 bln	20.665.199,00	12 bln	22.731.719	12 bln	25.004.891	12 bln	27.505.380		235.823.428	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 1 Unggul Bukit tinggi	12 bln	142.021.120	12 bln	23.430.858,0 0	12 bln	23.430.858,00	12 bln	25.773.944	12 bln	28.351.338	12 bln	31.186.472		274.194.590	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 16 Campago Ipuh	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Bukittinggi	12 bln	78.594.400	12 bln	21.871.712,0 0	12 bln	21.871.712,00	12 bln	24.058.883	12 bln	26.464.772	12 bln	29.111.249		201.972.727	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 17 Manggis Ganting	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Bukittinggi	12 bln	128.537.640	12 bln	20.331.143,0 0	12 bln	20.331.143,00	12 bln	22.364.257	12 bln	24.600.683	12 bln	27.060.751		243.225.618	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 4 Bukittinggi	12 bln	98.216.800	12 bln	21.671.572,0 0	12 bln	21.671.572,00	12 bln	23.838.729	12 bln	26.222.602	12 bln	28.844.862		220.466.138	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Lancarnya Proses Belajar Mengajar Di SMP Negeri 5 Bukittinggi	12 bln	83.219.280	12 bln	36.230.453,0 0	12 bln	36.230.453,00	12 bln	39.853.498	12 bln	43.838.848	12 bln	48.222.733		287.595.265	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 02 Percontoha n	Lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 6 Bukittinggi	12 bln	55.076.800	12 bln	97.229.177,0 0	12 bln	47.229,00	12 bln	51.952	12 bln	57.147	12 bln	62.862		152.525.167	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 03 Pakan Kurai	lancarnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 7 Bukittinggi	12 bln	66.901.500	12 bln	68.919.000,0 0	12 bln	68.919.000,00	12 bln	75.810.900	12 bln	83.391.990	12 bln	91.731.189		455.673.579	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 04 Bukit Apit	Terlaksana nya Proses Belajar Mengajar	12 bln	25.700.000	12 bln	24.441.826,0 0	12 bln	24.441.826,00	12 bln	26.886.009	12 bln	29.574.609	12 bln	32.532.070		163.576.340	Disdikbud

VI - 100	<i>Renstra Disdikbud 2016-2021</i>
-------------	------------------------------------

				Negeri 16 Tarok Dipo	Belajar Mengajar di SDN 10 Puhun Pintu Kabun																
				Penyeleng araan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Lancarnya proses belajar mengajar pada SDN 11 Campago Guguk Bulek		12 bln	23.062.000	12 bln	40.400.000,0 0	12 bln	36.262,00	12 bln	39.888	12 bln	43.877	12 bln	48,265		63.630.292	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Bukittinggi		12 bln	22.381.440	12 bln	19.310.000,0 0	12 bln	19.310.000,00	12 bln	21.241.000	12 bln	23.365.100	12 bln	25.701.610		131.309.150	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 19 Aur Tajungkan g Tengah Sawah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Kubu Gulai Bancak Bukittinggi		12 bln	25.363.200	12 bln	19.025.196,0 0	12 bln	19.025.196,00	12 bln	20.927.716	12 bln	23.020.487	12 bln	25.322.536		132.684.331	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 01 Ladang Cangkiah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 14 Tanjung Alam		12 bln	28.757.600	12 bln	18.956.136,0 0	12 bln	1.895.613.600,00	12 bln	2.085.174.960	12 bln	2.293.692.456	12 bln	2.523.061.702		8.845.256.454	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 02 Aur Kuning	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 15 Pulai Anak Air Kota Bukittinggi		12 bln	26.844.000	12 bln	21.717.883,0 0	12 bln	21.717.883,00	12 bln	23.889.671	12 bln	26.278.638	12 bln	28.906.502		149.354.578	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 16 Campago Ipuh Bukittinggi		12 bln	24.953.200	12 bln	29.230.000,0 0	12 bln	29.230.000,00	12 bln	32.153.000	12 bln	35.368.300	12 bln	38.905.130		189.839.630	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 04 Birugo	Lancarnya PBM di SD Negeri 17 Manggis Ganting		12 bln	26.598.360	12 bln	97.639.007,0 0	12 bln	97.639.007,00	12 bln	107.402.908	12 bln	118.143.198	12 bln	129.957.518		577.379.998	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 05 Birugo	lancarnya proses belajar mengajar di SDN 18 Campago Guguk Bulek		12 bln	44.467.040	12 bln	24.428.000,0 0	12 bln	24.428,00	12 bln	26.871	12 bln	29.558	12 bln	32.514		69.008.410	Disdikbud
				Penyeleng araan SD Negeri 06 Parit Antane	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 01		12 bln	57.966.200	12 bln	20.288.045,0 0	12 bln	20.288.045,00	12 bln	22.316.850	12 bln	24.548.534	12 bln	27.003.388		172.411.062	Disdikbud

VI - 102	<i>Renstra Disdikbud 2016 - 2021</i>
-------------	--

				Lanjutan Pembangu nan RKB SD Kota Bukittinggi (DID)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 13 Bukit Apit Puhun Bukittinggi				1 pkt	909.650.000, 00	1 pkt	909.650.000							1.819.300.000	Disdikbud
				Pekerjaan Rehab Pagar Sekolah SD Kota Bukittinggi (DID)	Lancarnya proses belajar mengajar di SDN 14 ATTS Bukittinggi				1 pkt	132.726.450, 00	1 pkt	132.726.450							265.452.900	Disdikbud
				Pembangu nan Rehabilitas i SD Kota Bukittinggi (DID)	Lancarnya pelaksanaa n PBM				1 pkt	264.985.000, 00	1 pkt	264.985.000							529.970.000	Disdikbud
				Pekerjaan Rehab Wc / Jamban SD Kota Bukittinggi (DID)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SDN 17 Pakan Kurai				1 pkt	237.300.000, 00	1 pkt	237.300.000							474.600.000	Disdikbud
				Pengadaan Komputer Untuk Ujian Nasional Bebasis Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT (DID)	Lancarnya Proses Belajar dan Mengajar di Sekolah				1 pkt	973.000.000, 00	1 pkt	973.000.000							1.946.000.000	Disdikbud
				Lanjutan Pembangu nan RKB SMPN 7 Bukittinggi (DID)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SD Negeri 19 ATTS Bukittinggi				1 pkt	850.000.000, 00	1 pkt	850.000.000							1.700.000.000	Disdikbud
				Lanjutan Pembangu nan RKB SMPN 8 Bukittinggi (DID)	Kelancaran Proses Belajar Mengajar di Sekolah				1 pkt	850.000.000, 00	1 pkt	850.000.000							1.700.000.000	Disdikbud
				Lanjutan Pembangu nan RKB SMPN 6 Bukittinggi (DID)	Lancarnya Pelaksanaa n Proses Belajar Mengajar di sekolah				1 pkt	103.100.000, 00	1 pkt	103.100.000							206.200.000	Disdikbud
				Rehab WC SMP Negeri Kota Bukittinggi (DID)	Lancarnya Proses PBM pada SDN 03 Pakan Labuah				1 pkt	224.365.000, 00	1 pkt	224.365.000							448.730.000	Disdikbud
				Operasiona l DAK SMP	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di Sekolah		1 keg	29.982.000	1 keg	30.694.000,0 0	1 keg	30.694.000	1 keg	33.763.400	1 keg	37.139.740	1 keg	40.853.714	203.126.854	Disdikbud
				Pesantren Pelajar SMP Kota	Lancarnya Proses Belajar		1 keg	24.900.308	1 keg	186.480.000, 00	1 keg	250.000.000	1 keg	275.000.000	1 keg	302.500.000	1 keg	332.750.000	1.371.630.308	Disdikbud

VI - 104	<i>Renstra Disdikbud 2016-2021</i>
-------------	------------------------------------

[illegible]

VI - 106	<i>Renstra Disdikbud 2016-2021</i>
-------------	------------------------------------

				Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah Pada Semua Jenjang Pendidikan	Termotivasi siswa kota Bukittinggi					-	1 keg	102.455.000,00	1 keg	112.700.500	1 keg	123.970.550	1 keg	136.367.605		475.493.655	Disdikbud
				Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukit tinggi					-	1 keg	30.000.000,00	1 keg	33.000.000	1 keg	36.300.000	1 keg	39.930.000		139.230.000	Disdikbud
				Pengembangan Pusat Sumber Belajar dan Sistem Evaluasi Daya Serap SD (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	Meningkatnya motivasi siswa kota Bukittinggi yang berprestasi			432.000.000												432.000.000	Disdikbud
				Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk SD/MI Kota Bukittinggi							1 keg	236.438.500,00	1 keg	260.082.350	1 keg	286.090.585	1 keg	314.699.644		1.097.311.079	
				Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk SMP/MTs Kota Bukittinggi							1 keg	98.781.500,00	1 keg	108.659.650	1 keg	119.525.615	1 keg	131.478.177		458.444.942	
				Pembebasan Tanah SDN 05 Birugo							1 pkt	600.000.000	1 pkt	660.000.000	1 pkt	726.000.000	1 pkt	798.600.000		2.784.600.000	
				Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Optimalnya pelaksanaan beasiswa pada jenjang SMP						1 keg	40.000.000,00	1 keg	44.000.000	1 keg	48.400.000	1 keg	53.240.000		185.640.000	
				Asesmen siswa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA/SMK									1 keg	250.000.000	1 keg	325.000.000	1 keg	400.000.000		975.000.000	
				Pengadaan Jaringan Internet di SD Kota Bukittinggi									1 keg	200.000.000	1 keg	200.000.000	1 keg			400.000.000	
				Liga Sepak Bola (gala Siswa Tk SMP)									1 keg	147.694.000	1 keg	150.000.000	1 keg	175.000.000		472.694.000	
			Apk paud	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD dan TK			406.113.950		517.525.000,00		1.065.380.350		2.084.933.395		1.883.326.735		1.999.859.408		7.957.138.837	Disdikbud

				Penyelenggaraan TK N Pembina		12 bln	34.300.000	12 bln	27.916.000,00	12 bln	27.916.000	12 bln	30.000.000	12 bln	33.000.000	12 bln	36.300.000		189.432.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan TK N 1 Bkt								12 bln	60.000.000	12 bln	66.000.000	12 bln	72.600.000		198.600.000	
				Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK "Harapan Bunda"	Tersedianya Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Bukittinggi	12 bln	59.070.000	12 bln	58.070.000	12 bln	58.070.000	12 bln							175.210.000	Disdikbud
				Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)		6 lomba		6 lomba	39.540.000,00	6 lomba	35.944.000	6 lomba	39.538.400	6 lomba	43.492.240	6 lomba	47.841.464		206.356.104	Disdikbud
				Jambore Pendidik PAUD	Terlaksananya Pembelajaran Kelompok Bermain dan Taman kanak-kanak "harapan bunda"	8 Cabang Lomba	30.730.000	8 Cabang Lomba	30.041.300,00	8 Cabang Lomba	45.249.900	8 Cabang Lomba	49.774.890	8 Cabang Lomba	54.752.379	8 Cabang Lomba	60.227.617		270.776.086	Disdikbud
				Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	Terpilihnya pemenang lomba Anak Usia Dini Kota Bukittinggi	100 %	28.322.000	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000	100 %	82.500.000	100 %	90.750.000	100 %	99.825.000		451.397.000	Disdikbud
				Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI	Terlaksananya Jambore Pendidik PAUD	15 lomba	25.000.000	15 lomba	79.336.000	15 lomba	45.249.900	15 lomba	49.774.890	15 lomba	54.752.379	15 lomba	60.227.617		314.340.786	Disdikbud
				Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP			45.000.000		11.480.950,00		15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		126.095.950	Disdikbud
				Penunjang akreditasi PAUD DIKMAS	Terlaksananya pembayaran Reward bagi anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF Kota Bukittinggi	100 %	79.545.000	100 %	16.387.950,00	100 %	16.387.950	100 %	18.026.745	100 %	19.829.420	100 %	21.812.361		171.989.426	Disdikbud
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	Terlaksananya Lomba PTK PAUDNI	7 orang	11.489.950	7 orang	49.455.800,00	7 orang	49.454.900	7 orang	54.400.390	7 orang	59.840.429	7 orang	65.824.472		290.465.941	Disdikbud
				Operasional Penyelenggaraan izin PAUD - KB	Terbitnya izin, perpanjangan izin operasional	12 bln		12 bln	26.700.000,00	12 bln	26.700.000	12 bln	29.370.000	12 bln	32.307.000	12 bln	35.537.700		150.614.700	Disdikbud

VI - 109	<i>Renstra Disdikbud 2016-2021</i>
-------------	------------------------------------

				dan atap PAUD FLAMBOY AN																
				Pembuatan tugu UKS dan taman ,sertabak air,bak pasir TK Pembina						1 pkt	20.000.000	1 pkt	22.000.000	1 pkt					42.000.000	
				Pengadaan mobilier permaiana untuk PAUD NURUL ULUM terintegrasi POSYAND U Aua BATAMU						1 pkt	20.000.000	1 pkt	22.000.000	1 pkt					42.000.000	
				Rehab PAUd TK Kenari						1 pkt	20.000.000	1 pkt	22.000.000	1 pkt					42.000.000	
				Pentas seni anak PAUD	Terlaksana Pentas seni anak PAUD							5 cabang	35.000.000	5 cabang					35.000.000	
				Bantuan SARANA PRASARAN A Lembaga PAUDNI (159 lembaga)	Terlaksana Bantuan SARANA PRASARAN A Lembaga PAUDNI							6 paket	90.000.000	6 paket	120.000.000	6 paket	120.000.000		330.000.000	
				Meningkatn ya pengetahua n pendidik PAUD							49.454.900,00								49.454.900	
				Sosialisasi Kurikulum PAUDNI	Terlaksanan ya Sosialisasi Kurikulum PAUDNI							1 keg	75.000.000	1 keg	85.000.000	1 keg	90.000.000		250.000.000	
				Insentif pendidik PAUDNI	Terlaksana pemberian Insentif pendidik PAUDNI sesuai aturan							250 org	100.000.000	250 org	100.000.000	250 org	100.000.000		300.000.000	
				Pelatihan keterampilan PAUDNI	Terlaksanan ya Pelatihan keterampilan PAUDNI sesuai ketentuan							100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000		450.000.000	
				Pentas seni pendidik PAUD	Terlaksana Pentas seni pendidik PAUD sesuai ketentuan							5 cabang	35.000.000	5 cabang	35.000.000	5 cabang	35.000.000		105.000.000	
				Senam massal peserta didik PAUD	Terlaksana Senam massal peserta didik PAUD sesuai							1 keg	28.000.000	1 keg	28.000.000	1 keg	28.000.000		84.000.000	

[illegible]

				Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa pada Semua Jenjang Pendidikan		90%	85.505.000			0								85.505.000	Disdikbud
				Reward Siswa Berprestasi tk.Prov dan Nasional		100%	25.000.000			0								25.000.000	Disdikbud
				Penerimaan Peserta Didik Baru		100%	33.150.000			-								33.150.000	Disdikbud
				Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N SMP dan SMA)		90%	167.930.000			-								167.930.000	Disdikbud
				Lomba dan Pembinaan P4 Siswa SLTA		90%	67.160.000			-								67.160.000	Disdikbud
				Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SLTP/SLTA		1keg	19.000.000			-								19.000.000	Disdikbud
				Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK		1keg	56.355.000			-								56.355.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMAN 1	Lancarnya PBM di SMAN 1	12 bln	143.336.400			-								143.336.400	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMAN 2	Lancarnya PBM di SMAN 2	12 bln	139.490.000			0								139.490.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMAN 3	Lancarnya PBM di SMAN 3	12 bln	72.202.000			0								72.202.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMAN 4	Lancarnya PBM di SMAN 4	12 bln	82.133.000			0								82.133.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMAN 5	Lancarnya PBM di SMAN 5	12 bln	55.078.360			0								55.078.360	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMKN 1	Lancarnya PBM di SMKN 1	12 bln	142.140.000			0								142.140.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan PBM di SMKN 2	Lancarnya PBM di SMKN 2	12 bln	134.690.000			0								134.690.000	Disdikbud
				Penunjang Operasional Edotel Pada SMK Negeri 2 Bukittinggi	Terlaksananya Operasional Edotel Pada SMK Negeri 2 Bukittinggi	12 bln	120.320.000			0								120.320.000	Disdikbud
				Bimtek Karya Tulis Guru SLTP/SLTA		1keg	73.900.000											73.900.000	Disdikbud

				Persiapan Pendelegasi an Wewenang SLTA ke Propinsi (Tim P3D)		1 keg	27.000.000											27.000.000	Disdikbud
				Pengembangan pusat sumber belajar dan sistem evaluasi daya serap untuk SMAN 3 Bukittinggi (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	Terlaksanan ya Pengembangan pusat sumber belajar dan sistem evaluasi daya serap untuk SMAN 3 Bukittinggi (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	1 pkt	177.000.000											177.000.000	Disdikbud
				Sharing pendanaan pengadaan ruang kelas baru SMA/SMK (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	Terlaksanan ya Sharing pendanaan pengadaan ruang kelas baru SMA/SMK (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	1 pkt	1.400.000.000											1.400.000.000	Disdikbud
				Pembangun an Asrama Pelajar SMA 1 Bukittinggi (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	Terlaksanan ya Pembanguna n Asrama Pelajar SMA 1 Bukittinggi (Dana Bantuan Keuangan Khusus)	1 pkt	450.000.000											450.000.000	Disdikbud
				Pengadaan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (Dana Sharing Bantuan Keuangan Khusus Propinsi)	Terlaksanan ya Pengadaan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (Dana Sharing Bantuan Keuangan Khusus Propinsi)	1 pkt	1.600.000.000											1.600.000.000	Disdikbud
				Penjaminan Keberlangs ungan Pendidikan Siswa (Dana Sharing Bantuan Keuangan Khusus Propinsi)	Terlaksanan ya Penjaminan Keberlangs ungan Pendidikan Siswa (Dana Sharing Bantuan Keuangan Khusus Propinsi)	1 keg	92.880.000											92.880.000	Disdikbud
				DAK Bidang Pendidikan - SMA (Sisa DAK 2010-2014)	Terlaksanan ya keg DAK Bidang Pendidikan - SMA (Sisa DAK 2010-2014)	1 pkt	455.523.000											455.523.000	Disdikbud

				DAK Bidang Pendidikan - SMK (Sisa DAK 2010-2014)	Terlaksanaan ya keg DAK Bidang Pendidikan - SMK (Sisa DAK 2015)	1 pkt	218.671.819												218.671.819	Disdikbud
				Program Pendidikan Non Formal			675.562.000		370.168.805,00		2.043.228.006		2.461.989.640		2.619.388.604		2.792.827.464		10.963.164.519	Disdikbud
				Apresiasi LKP Berprestasi			18.040.000		58.430.500		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		447.750.500	Disdikbud
				Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah		12 bln	17.449.000	12 bln	14.159.905,00	12 bln	25.000.000	12 bln	27.500.000	12 bln	30.250.000	12 bln	33.275.000		147.633.905	Disdikbud
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA		12 bln	36.300.000	12 bln	37.500.000,00	12 bln	37.500.000	12 bln	41.250.000	12 bln	45.375.000	12 bln	49.912.500		247.837.500	Disdikbud
				Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Paket C (Paket C Vokasional)		12 bln	41.291.250	12 bln	81.088.000,00	12 bln	62.007.000	12 bln	68.207.700	12 bln	75.028.470	12 bln	82.531.317		410.153.737	Disdikbud
				Ujian Nasional Pendidikan Keseneteraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II		12 bln	51.700.000	12 bln	56.224.400,00	12 bln	56.221.700	12 bln	61.843.870	12 bln	68.028.257	12 bln	74.831.083		368.849.310	Disdikbud
				Penyelenggaraan UPTD SKB Kota Bukittinggi		12 bln	11.249.950	12 bln	55.982.000	12 bln	55.982.000	12 bln	61.580.200	12 bln	67.738.220	12 bln	74.512.042		327.044.412	Disdikbud
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP		12 bln	19.528.250	12 bln	33.250.000	12 bln	33.250.000	12 bln	36.575.000	12 bln	40.232.500	12 bln	44.255.750		207.091.500	Disdikbud
				Penunjang operasional BOP		12 bln	56.233.400	12 bln	17.494.000,00	12 bln	35.950.000	12 bln	39.545.000	12 bln	43.499.500	12 bln	47.849.450		240.571.350	Disdikbud
				Operasional Kegiatan / Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD		12 bln	48.737.500	12 bln	16.040.000	12 bln	16.040.000	12 bln	17.644.000	12 bln	19.408.400	12 bln	21.349.240		139.219.140	Disdikbud
				Bimbingan komputer		1 keg	88.280.000				6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		116.126.000	Disdikbud

				warga paket B dan C menuju UNBK																
				Penunjang Akreditasi SKB, Program PAUD (TK,KB),Paket A,B,C,Dapodik,dan Validasi Data Nilek dan Nilem		1 keg	40.000.000				14.000.000		15.400.000		16.940.000		18.634.000		104.974.000	Disdikbud
				Diklat Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik(Akhir Diklat adanya Studi Komperatif) untuk 12 orang		1 keg	17.449.000			-	42.000.000		46.200.000		50.820.000		55.902.000		212.371.000	Disdikbud
				Workshop Tutor Paket A, B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)		1 keg	11.789.000						-		-		-		11.789.000	Disdikbud
				Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C (UNKP/UNBK)		1 keg	47.005.750			-	6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		74.851.750	Disdikbud
				Pengadaan Komputer dan Jaringan internet							120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		556.920.000	Disdikbud
				Implementasi program pendidikan keluarga berbasis satuan pendidikan		1 keg	17.554.400			-	75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		365.629.400	Disdikbud
				Sosialisasi edukasi pendidikan keluarga kepada orag tua		1 keg	31.954.500				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		264.004.500	Disdikbud
				Forum group discation (FGD) rapat koordinasi kelompok kerja pedidikan keluarga		1 keg	46.000.000				25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		162.025.000	Disdikbud

				Parenting Bubasis perkembangan otak			1 keg	75.000.000	-		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		307.050.000	Disdikbud
				Edukasi kepada orang tua untuk bimbingan pada anak autis							50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		232.050.000	
				Penyediaan Jasa Pengaman an Kantor di SKB	Tertaksana ya bimbingan komputer bagi warga belajar Paket B dan C menuju UNBK (30 orang)						48.000.000		52.800.000		58.080.000		63.888.000		222.768.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di SKB	Tertaksana nya proses akreditasi satu pendidikan beserta programnya serta Dapodik, validasi data, Nilek dan Nilem						48.000.000		52.800.000		58.080.000		63.888.000		222.768.000	
													-		-		-		-	
				Workshop Tutor Paket A, B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)	Terlatihnya Pamong Belajar dan Penilik								-		-		-		-	
				Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C (UNKP/UNBK)	Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C (30 orang)						56.221.700		61.843.870		68.028.257		74.831.083		260.924.910	
				Pengadaan Komputer dan Jaringan internet	Tertaksana nya Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (paket A,B dan C)						120.000.000		132.000.000		145.200.000		159.720.000		556.920.000	
				Implementasi program pendidikan keluarga berbasis satu satu pendidikan	Tertaksana nya pengadaan 20 unit Komputer dan jaringan internet						75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		348.075.000	
				Sosialisasi edukasi pendidikan keluarga kepada orang tua							50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		232.050.000	

				Forum group discation (FGD) rapat koordinasi kelompok kerja pedidikan keluarga							25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		116.025.000	
				Parenting Bubasis perkembangan otak							50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		232.050.000	
				Edukasi kepada orang tua untuk bimbingan pada anak autis							50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		232.050.000	
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor di SKB							48.000.000		52.800.000		58.080.000		63.888.000		222.768.000	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di SKB							48.000.000		52.800.000		58.080.000		63.888.000		222.768.000	
				Rehab sarana TK Pembina	Terlaksana Pelatihan pengasuh dan pengelola TPA(Tempat Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) sesuai aturan							1 paket	15.000.000	2 paket	24.000.000	1 paket	20.000.000		59.000.000	
				Pengadaan mobiler	Tersedia mobiler							1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000		225.000.000	
				Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional	Terselenggara pendidikan keaksaraan fungsional							6 kelompok	60.000.000	6 kelompok	60.000.000	6 kelompok	60.000.000		180.000.000	
				Pelatihan pengasuh dan pengelola TPA(Tempat Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain)	Terlaksana Pelatihan pengasuh dan pengelola TPA(Tempat Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain) sesuai aturan							40 org	39.000.000	40 org	39.000.000	40 org	39.000.000		117.000.000	
				Lomba Cerdas terampil warga belajar kesetaraan	Lomba Cerdas terampil warga belajar kesetaraan							4 cabang lomba	25.000.000	4 cabang lomba	25.000.000	4 cabang lomba	25.000.000		75.000.000	
				Workshop Penulisan karya	Terlaksana kegiatan Workshop					40 org	43.175.000	40 org	45.000.000	40 org	47.000.000	40 org	50.000.000		185.175.000	

				ilmiah/karya inovatif bagi PTK	Penulisan karya ilmiah/karya inovatif bagi PTK sesuai target															
				Pemberian Insentif bagi Tutor Kesenitaraan 20 orang @ 350.000/bln	Terlaksana Pemberian Insentif bagi Tutor Kesenitaraan 20 orang @ 350.000/bln sesuai aturan					20 org	84.000.000	20 org	94.000.000	20 org	94.000.000	20 org	94.000.000		366.000.000	
				Bimbingan komputer warga paket B dan C menuju UNBK	Terlaksana kegiatan Bimbingan komputer warga paket B dan C menuju UNBK sesuai target					100 org	100.000.000	100 org	100.000.000	100 org	100.000.000	100 org	100.000.000		400.000.000	
				Lomba Baca puisi dan ayat pendek bagi anak usia dini	Terlaksana Lomba Baca puisi dan ayat pendek bagi anak usia dini sesuai aturan					1 keg	35.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	42.000.000	1 keg	45.000.000		162.000.000	
				Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional (HAI)	Terlaksana Pameran dalam rangka Hari Aksara Internasional (HAI) dengan baik					1 keg	98.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000		398.000.000	
				Pendataan terintegrasi	Terlaksana Pendataan terintegrasi secara maksimal					1 keg	35.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	50.000.000		170.000.000	
				Dana Penunjang Tugas Pokok Pamong Belajar (Kegiatan Belajar Mengajar, Pengembangan Model, Pengkajian Program, Pengembangan Profesi)	Terlaksananya Tugas Pokok Pamong Belajar						-		8.000.000		9.000.000		10.000.000		27.000.000	
				Program Keaksaraan Fungsional Berbasis keterampilan	Terlaksanaan program pembelajaran keaksaraan Fungsional berbasis Keterampilan						-		15.000.000		27.000.000		29.000.000		71.000.000	
				Program PKH/Life Skill	Terlaksnaya Program pendidikan						-				-				-	

					Kecapaian Hidup																	
				- Bengkel Sepeda Motor (10 orang)				-		-			-		50.000.000	-					50.000.000	
				- Keterampil an Teknik Komputer dan jaringan (10 orang)				-		-			-			-	30.000.000				30.000.000	
				Pendidikan Kepemudaa n (30 orang)	Terlaksana nya Program pendidikan Kepemuda an			-		-			-			-		18.000.000			18.000.000	
				Pendidikan Pemberday aan Perempuan	Terlaksana nya Program pendidikan Pemberday aan Perempuan			-		-			-			-					-	
				- menjahit pakaian (20 orang)				-		-			-		100.000.000	-					100.000.000	
				- Desain interior (gorden, taplak meja, seprai dsb) 20 orang				-		-			-			-	80.000.000				80.000.000	
				- bordir (20 orang)				-		-			-			-		80.000.000			80.000.000	
				Pelatihan Uji Kompetensi penilik, pamong belajar dan calon penilik, calon pamong belajar (20 orang)	Terlatihnya Pamong Belajar dan Penilik			-		-		85.000.000				-	50.000.000				135.000.000	
				Workshop Tutor Paket A, B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)	Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C (30 orang)			-		-				45.000.000	-			48.000.000			93.000.000	
				Penyelengg araan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C (UNKP/UN BK)	Terlaksana nya Kegltan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (paket A,B dan C)			-		-		6.000.000		7.000.000	-		8.000.000			9.000.000	30.000.000	
				PROGRAM PENDIDIKAN N LUAR BIASA				60.680.000		49.440.303,00		49.440.303,00							9.000.000			Disdikbud

				Penyelenggaraan SDLB Manggis Ganting			60.680.000		49.440.303,00		49.440.303,00					9.000.000			Disdikbud	
			7. Rata-rata nilai US SD	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			6.600.460.800		5.336.918.535,00		7.849.065.100		8.306.916.200		8.956.107.820		8.873.433.602		45.922.902.057	Disdikbud
			8. Rata-rata nilai UN SMP	Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan UKG	Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		44.935.000		54.353.000,00		40.400.000		44.440.000		48.884.000		53.772.400		286.784.400	Disdikbud
			9. Jumlah prestasi ditingkat Provinsi dan Nasional	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	Persentase Peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan		95.000.000		89.890.000,00		90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		602.580.000	Disdikbud
			10. Rata-rata lama sekolah	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Persentase peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan		5.608.665.000		5.053.625.000,00		5.053.625.000		5.558.987.500		6.114.886.250		6.726.374.875		34.116.163.625	Disdikbud
				Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan		94.926.000		67.127.435,00		70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		486.923.435	Disdikbud
				Kajian dan Analisis Mutu Pengelolaa n 8 Standar Pendidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga		105.236.800		47.323.100,00		47.323.100		-		-		-		199.883.000	Disdikbud
				Gebyar Expo pendidikan			411.275.000		24.600.000		35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		598.310.000	Disdikbud
				Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan pengawas sekolah	Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan		240.423.000				450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		2.328.873.000	Disdikbud
				Pengembangan Konsep Smart Education bagi KKG dan MGMP	Tingkat APK dan APM SD dan SMP						250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		1.160.250.000	
				Training Aplikasi Smart Education							250.000.000				-				250.000.000	
				Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan							250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		1.160.250.000	

				Worshop peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam melakukan analisis hasil belajar, perbaikan dan pengayaan						60.000.000		66.000.000		72.600.000			198.600.000	
				Worshop peningkatan kompetensi guru kelas dan mata pelajaran tentang strategi dan metode pembelajaran Pakem						85.000.000		93.500.000		102.850.000			281.350.000	
				Workshop peningkatan kompetensi kepala sekolah SD,SMP dalam melakukan penilaian hasil belajar berdasarkan kurikulum 2013						65.000.000		71.500.000		78.650.000			215.150.000	
				Workshop peningkatan kompetensi kepala sekolah SD,SMP dan penyusunan program peningkatan mutu sekolah dan supervisi kunjungan kelas						75.000.000		82.500.000		90.750.000			248.250.000	
				Worshop literasi guru kelas dan furu mata pelajaran						100.000.000		110.000.000		121.000.000			331.000.000	
			11. Angka Putus Sekolah	Program Manajemen Pelayanan				592.779.300	1.271.026.503,00	2.524.476.603				2.524.476.603			6.912.759.009	Disdikbud
				Pengelolaan Website Disdikpora Kota Bukittinggi	Untuk memudahkan pelayanan informasi tentang pendidikan			115.773.800	47.285.000,00	47.285.000				47.285.000			257.628.800	Disdikbud

				Terlaksana nya hubungan kerjasama 2 negara							450.000.000				450.000.000			900.000.000	
				Terlaksana nya Program Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi							43.820.000				43.820.000			87.640.000	
				Terlaksana nya LOMBA Karya Tulis Remaja							45.735.000				45.735.000			91.470.000	
				Pengelola n Data Back Bone	Tersedianya Data Back Bone					43.581.000,0 0	43.581.000				43.581.000			130.743.000	Disdikbud
				Pengelola n Data SIPBM	Tersedianya data yang akurat di dinas pendidikan					39.509.500,0 0	39.509.500				39.509.500			118.528.500	Disdikbud
				Pengemba ngan IT Pendidikan Kota Bukittinggi	Tercapainya program pemko Bukittinggi di Bidang Pendidikan					659.100.000, 00	659.100.000				659.100.000			1.977.300.000	Disdikbud
				Terwujudn ya Pendidikan Berkarakte r Berbasis Aqiqah Kota Bukittinggi							100.000.000				100.000.000			200.000.000	
				Peningkata n Manajeme n, Monitoring , Evaluasi, dan Verifikasi Bansos dan Hibah	Pelaksanaan monev dan verifikasi bansos dan hibah					-	15.197.000				15.197.000			30.394.000	Disdikbud
				Pengadaan Infrastrukt r Smart Education	Tersedianya Infrastruktur Smart Education						450.000.000				450.000.000			900.000.000	
				PROGRAM PENINGKAT AN PERAN SERTA KEPEMUDA AN				369.710.000										369.710.000	Disdikbud
				Kegiatan Kepemudaa n (PPAN, BPAP/JPI, Pemuda Pelopor, PSP3)	Terselenggar anya Kegiatan Kepemudaan (PPAN, BPAP/JPI, Pemuda Pelopor, PSP3)			60.879.000										60.879.000	Disdikbud
				Kegiatan Pendidikan Bela Negara	Terselenggar anya Kegiatan Pendidikan Bela Negara			93.831.000										93.831.000	Disdikbud

				Lomba Marching Band	Terselenggara any Lomba Marching Band			215.000.000											215.000.000	Disdikbud
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAN AKATAN OLAHRAGA				7.895.201.600											7.895.201.600	Disdikbud
				Kejurda Cabang Olahraga	Terlaksanan ya Kejurda Cabang Olahraga			50.867.100											50.867.100	Disdikbud
				Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Masyarakat dalam Rangka Car Free Day	Terlaksanan ya Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Masyarakat dalam Rangka Car Free Day			39.460.000											39.460.000	Disdikbud
				Pelaksanaan Kegiatan Divabel Kota Bukittinggi, Propinsi dan Nasional	Terlaksanan ya Pelaksanaan Kegiatan Divabel Kota Bukittinggi, Propinsi dan Nasional			71.500.000											71.500.000	Disdikbud
				Invitasi Bola Basket (Walikota CUP)	Terlaksanan ya Invitasi Bola Basket (Walikota CUP)			71.053.000											71.053.000	Disdikbud
				Lomba/pertandingan olahraga dalam rangka PHBN	Terlaksanan ya Lomba/pertandingan olahraga dalam rangka PHBN			286.585.000											286.585.000	Disdikbud
				Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tk Propinsi dan Nasional	Terlaksanan ya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tk Propinsi dan Nasional			166.760.000											166.760.000	Disdikbud
				Sepeda Wisata	Terselenggara any kegiatan Sepeda Wisata			149.180.000											149.180.000	Disdikbud
				Penyediaan Bonus Atlit	Tersedianya Bonus Atlit			7.059.796.500											7.059.796.500	Disdikbud
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA				782.785.000											782.785.000	Disdikbud
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			300.690.000											300.690.000	Disdikbud

VI - 126	<i>Renstra Disdikbud 2016-2021</i>
-------------	------------------------------------

				MUDA																
				Penyelenggaraan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Terselenggara Upacara Hari-hari Besar Nasional			111.436.100											111.436.100	Disdikbud
				Pawai Alegoris dan Pembangunan	Terlaksananya Pawai Alegoris dan Pembangunan			54.470.000											54.470.000	Disdikbud
2	Peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Disdikbud	Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP Disdikbud	Nilai Sakip Disdikbud	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran			1.174.043.350	866.938.391,00	1.275.243.224	1.402.767.546	1.543.044.301	1.697.348.731	7.959.385.544						Disdikbud
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya			9.999.000	14.999.000,00	14.999.000	16.498.900	18.148.790	19.963.669	94.608.359						Disdikbud
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			59.500.000	75.000.000,00	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	482.575.000						Disdikbud
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				20.000.000		150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	716.150.000						Disdikbud
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)				20.000.000,00	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	460.895.000						Disdikbud
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor			149.439.150	112.500.000,00	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000	354.759.150						Disdikbud
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral computer			95.726.700	95.000.000,00	69.850.000	76.835.000	84.518.500	92.970.350	514.900.550						Disdikbud

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor		67.378.500		69.850.000,00		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		369.278.500	Disdikbud
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya barang cetakan dan penggandaan		17.000.000		17.000.000,00		10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		80.410.000	Disdikbud
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		10.000.000		10.000.000,00		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		252.050.000	Disdikbud
				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Tersedianya makanan dan minuman		50.000.000		50.000.000,00		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		1.260.250.000	Disdikbud
				Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya informasi yang bisa ditindak lanjuti serta terpenuhinya kebutuhan untuk rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas		275.000.000		177.195.167,00		75.394.224		82.933.646		91.227.011		100.349.712		802.099.761	Disdikbud
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pegawai non PNS		200.000.000		75.394.224,00		140.000.000		154.000.000		169.400.000		186.340.000		925.134.224	Disdikbud
				Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya penyediaa n tenaga pengamanan kantor		20.000.000		140.000.000,00		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		1.088.200.000	Disdikbud
				Fasilitasi Kunjungan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa		200.000.000		10.000.000,00		75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		558.075.000	Disdikbud
				Program Peningkatan Sarana dan	Tingkat kelengkapan sarana		303.500.000		131.000.000,00		131.000.000		144.100.000		158.510.000		174.361.000		1.042.471.000	

VI - *Renstra Disdikbud 2016-*
129 *2021*

				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai			108.000.000			150.000.000			200.000.000			458.000.000	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu			74.293.750		53.134.000,00	318.741.000						446.168.750	
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran			8.085.000		8.085.000,00	9.500.000						25.670.000	
				Sosialisasi pengelolaan keuangan							74.022.500						74.022.500	Disdikbud
				Rekonsiliasi pengelolaan keuangan							26.350.000						26.350.000	Disdikbud
				workshop bagi PPTK dalam program keuangan							80.000.000						80.000.000	
				Analisis Rencana Kebutuhan Belanja Operasional Sekolah bersumber dana APBD							50.000.000						50.000.000	
				Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD							10.000.000						10.000.000	
				Peningkatan Manajemen, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bansos dan Hibah	Rencana kerja dan keuangan						0						-	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000,00	5.000.000						25.000.000	Disdikbud
				Penyusunan Laporan LPPD				50.791.750		15.197.000,00	45.000.000						110.988.750	Disdikbud

				Penyusunan LKPJ	Realisasi laporan kinerja					5.417.000		5.000.000,00		4.000.000					14.417.000	Disdikbud		
				Penyusunan Pelaporan Digital	Realisasi anggaran dan kinerja laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah							4.983.500,00		5.000.000					9.983.500	Disdikbud		
				Penyusunan LKPJ	Realisasi anggaran dan kinerja laporan keterangan pertanggung jawaban							4.983.500,00		4.983.500,00					9.967.000	Disdikbud		
				Penyusunan Pelaporan Digital	Realisasi anggaran dan kinerja laporan digital							4.885.000,00		4.885.000,00					9.770.000	Disdikbud		
	Peningkatan Pendidikan kebudayaan	Meningkatkan pelestarian budaya	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda							1.165.361.250,00		1.315.183.000		895.000.000		940.000.000		970.000.000	2.480.544.250	Disdikbud
				Lomba Baca Puisi Perjuangan Tingkat Sekolah Dasar se Kota Bukittinggi	Terselenggaranya Lomba Baca Puisi Perjuangan Tingkat Sekolah Dasar se Kota Bukittinggi							49.547.000,00		49.547.000						99.094.000	Disdikbud	
				Workshop Seni dan Budaya Bagi Guru-guru Kesenian SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi	Terlaksananya Workshop Seni dan Budaya Bagi Guru-guru Kesenian SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi							86.041.250,00		0						86.041.250	Disdikbud	
				Workshop Seni dan Budaya	Terlaksananya Workshop Seni dan Budaya									630.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000	1.080.000.000	
				Pelaksanaan Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya	Terlaksananya Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya							146.175.000,00		146.175.000		230.000.000		240.000.000		250.000.000	1.012.350.000	Disdikbud
				Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat	Terfasilitasi Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat							321.020.500,00		0							321.020.500	Disdikbud

				Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat	Terlaksananya Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat				73.116.500,00	0							73.116.500	Disdikbud
				Festival Silek Tradisional	Terjaganya Nilai Tradisi di lingkungan Masyarakat				489.461.000,00	489.461.000		525.000.000	550.000.000		560.000.000		2.613.922.000	Disdikbud
				Pengadaan Alat Musik Tradisional SD													-	
			Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					562.371.000,00	3.216.075.000		1.240.000.000	1.285.000.000		2.640.000.000		3.778.446.000	Disdikbud
				Penataan Koleksi Museum					35.000.000,00	35.000.000		50.000.000	60.000.000		70.000.000		250.000.000	Disdikbud
				Penyediaan Database Koleksi Museum Daerah					44.796.000,00	44.796.000		90.000.000					179.592.000	Disdikbud
				Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah	Registrasi Cagar Budaya			50% CB	35.000.000,00	35.000.000		40.000.000	50.000.000				160.000.000	Disdikbud
				Sosialisasi Cagar Budaya	Sosialisasi dan field trip			2 keg / 135 peserta	43.210.000,00	43.210.000		80.000.000	90.000.000		100.000.000		356.420.000	Disdikbud
				Pendataan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan			12 Bln	44.390.000,00	44.390.000							88.780.000	Disdikbud
				Studi Kekayaan, Studi teknis, studi zonal, monitoring, bimtek						111.000.000							111.000.000	
				Pendataan Kelompok Seni dan Budaya Kota Bukittinggi				5 CB	17.682.000,00	17.682.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000		110.364.000	Disdikbud
				Pemeliharaan Cagar Budaya	Studi kelayakan, studi teknis, studi zonasi, mengikuti bimtek pelestarian CB dan Pemeliharaan CB				46.500.000,00								46.500.000	Disdikbud
				Pelestarian cagar budaya	Studi kelayakan, studi teknis, studi zonasi,					120.000.000		100.000.000	120.000.000		130.000.000		470.000.000	

					mengikuti bimtek pelestraian CB dan Pemeliharaan n CB														
				Cagar Budaya yang dilestarika n							6.500.000								
				Konservasi Koleksi Museum	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan					49.658.000,0 0	50.000.000		55.000.000		65.000.000				
				Pemelihara an Rumah Kelahiran Bung Hatta	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan					49.990.000,0 0	80.000.000		80.000.000		80.000.000				
				Tersampai kannya Informasi tentang cagar budaya kepada guru dan pelajar	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan						69.997.000								
				Operasiona l Rumah Kelahiran Bunga Hatta						146.145.000,0 00	200.000.000		250.000.000		275.000.000				
				Pengadaan Peningkata n Sarana dan Prasarana Rumah Kelahiran Bung Hatta	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan					50.000.000,0 0	50.000.000		60.000.000		70.000.000				
				Monitoring dan Evaluasi Pelestarian Cagar Budaya	Terjaganya cagar budaya						25.000.000		175.000.000		185.000.000				
				Terlaksana Kerjasama Seni Budaya							88.500.000								
				Jasa Pengaman an RKBH	Tersedianya Jasa Pengamanan RKBH						150.000.000		65.000.000		75.000.000				
				Jasa Kebersihan RKBH	Tersedianya Jasa Kebersihan RKBH						50.000.000								
				Program Aku Cinta Museum	Terlaksanan ya Program Aku Cinta Museum						60.000.000								
				Revitalisasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terlaksanan ya Revitalisasi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta						500.000.000								
				Pendokum entasian Seni dan	Tersedianya dokumentasi a Seni dan						95.000.000								

				6.500.000															
				75.000.000		294.658.000		Disdikbud											
				80.000.000		369.990.000		Disdikbud											
						69.997.000													
				300.000.000		1.171.145.000		Disdikbud											
				80.000.000		310.000.000		Disdikbud											
				195.000.000		580.000.000													
						88.500.000													
				85.000.000		375.000.000													
				160.000.000		210.000.000													
				160.000.000		220.000.000													
				500.000.000		1.000.000.000													
				300.000.000		395.000.000													

[illegible]

				Terlaksana nya Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaa n						12 bln	75.000,00							75.000	
				Terlatihny a Generasi Muda Kota Bukuttingg i						12 bln	99.797.900,00							99.797.900	
				Pelaksanaa n Festifal Silek Tradisional						12 bln	500.000,00							500.000	
				Pertunjuka n Tari Minang Tradisi di Mancaneg ara Sebagai Warisan Dunia						12 bln	450.000.000,00							450.000.000	
				Festival seni dan Kebudayaa n Dalam Negri						12 bln	250.000.000,00							250.000.000	
				Terlatihny a Generasi Muda dan Siswa Sekolah Dalam Memahami Nilai Tradisi						12 bln	160.000,00							160.000	
				Fasilitasi pengemba ngan keragaman budaya daerah "Lomba Tradisi tingkat umum se- Sumatera Barat"						12 bln	250.000.000,00	12 bln	255.000.000	12 bln	265.000.000	12 bln	275.000.000	1.045.000.000	
																		-	
			Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Program Pengemba ngan Kerjasam a Pengelola an Kekayaan Budaya					294.280.000, 00		530.901.000.00 0		3.480.000.000		3.570.000.000		2.625.000.000	531.195.280.000	Disdikbud
				Mengikuti Festival Kesenian dan Kebudayaa n Luar Negeri	terselenggar anya kerjasama Seni Budaya antar luar Negeri				100.000.000, 00	12 bln		12 bln	525.000.000	12 bln	535.000.000	12 bln	550.000.000	1.710.000.000	Disdikbud
				Mengikuti Festival	Terlaksanan nya kegiatan				127.314.000, 00	12 bln		12 bln	265.000.000	12 bln	275.000.000	12 bln	285.000.000	952.314.000	Disdikbud

				Kesenian dan Kebudayaan Dalam Negeri	Festival dalam Negeri																
				Mengikuti kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Luar Negeri					12 bln	66.966.000,00	12 bln	500.000.000.000	12 bln	80.000.000	12 bln	90.000.000	12 bln	100.000.000		500.336.966.000	Disdikbud
				Mengikuti kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Dalam Negeri					12 bln		12 bln	25.000.000.000	12 bln	-	12 bln		12 bln			#VALUE!	
				Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya)	terikutinya kegiatan JKPI, BPPI dan pelestiraian CB				12 bln		12 bln	100.000.000	12 bln	1.000.000.000	12 bln	1.000.000.000	12 bln			2.100.000.000	
				Mengikuti Kegiatan Permuseuman Daerah dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Permuseuman Daerah dan Nasional				12 bln	75.000.000,00	1 keg		110.000.000	1 keg	120.000.000	1 keg	130.000.000		435.000.000		
				Fasilitasi Pendirian Museum di Kota Bukittinggi	Terfasilitasin ya pendirian Museum di Kota Bukittinggi						1 keg		50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	20.000.000		#VALUE!		
				Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bukittinggi	Cagar budaya yang ditetapkan				1 keg	200.000.000,00	1 keg		130.000.000	1 keg	140.000.000	1 keg	150.000.000		620.000.000		
				Pembinaan Pengelola Cagar Budaya dan Museum	Terbinanya Pengelola Cagar Budaya dan Museum				12 bln	120.000.000,00	1 keg		100.000.000	1 keg	120.000.000	1 keg	130.000.000		470.000.000		
				Studi Sejarah Kota Bukittinggi	Terlestarikannya sejarah Kota Bukittinggi				1 keg	200.000.000,00									200.000.000		
				Studi Keluarga Bung Hatta	Terlestarikannya sejarah keluarga bung Hatta					80.000.000,00	1 keg		760.000.000	1 keg	770.000.000	1 keg	780.000.000		2.390.000.000		

				Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antara Negara Silek Tradisi	Terbangunya kemitraan pengelolaan kebudayaan antara Negara Silek Tradisi					1 keg	750.000.000,00	1 keg	460.000.000	1 keg	470.000.000	1 keg	480.000.000		2.160.000.000	
				Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar Negara	Terbangunya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar Negara					1 keg	450.000.000,00								450.000.000	
				Pelatihan silek tradisional	Terlatihnya generasi muda kota Bukittinggi dalam memahami nilai tradisi					12 bln	150.000.000,00								150.000.000	
				Pengadaan peralatan Sounsystem dan pakaian kesenian randai	Tersedianya peralatan Sounsystem dan pakaian kesenian randai					1 keg	450.000.000,00								450.000.000	
				Pengadaan sarana dan prasarana grup panitahan cupek nan duo	Tersedianya sarana dan prasarana grup panitahan cupek nan duo					1 keg	100.000.000,00								100.000.000	
				Pengadaan alat kesenian tradisional minang kabau	Tersedianya alat kesenian tradisional minang kabau					1 keg	986.000.000,00								986.000.000	
				Perlengkapan peralatan pencak silat	Tersedianya Perlengkapan peralatan pencak silat						360.000.000,00								360.000.000	
				Bantuan operasional pelatihan panitahan/pasambahan	Bantuan operasional pelatihan panitahan/pasambahan					1 keg	600.000.000,00								600.000.000	
				Pelatihan adat dan budaya Minangkabau kota Bukittinggi	Terlaksananya Pelatihan adat dan budaya Minangkabau kota Bukittinggi					1 keg	650.000.000,00								650.000.000	
				Workshop seni budaya (Implementasi ABSSBK dalam ranah kesenian)	Terlaksananya Workshop seni budaya (Implementasi ABSSBK dalam ranah kesenian)					1 keg	630.000.000,00								630.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA		PENJELESAN/FORMULA PERHITUNGAN	Target Awal	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata rata lama sekolah	Rata rata lama sekolah	10,95	10.95	11.30	11.31	11.32	11.33	11.44
2	Harapan lama sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu	14,93	14.93	14.94	14.95	14.96	14.96	15

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016—2021 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta visi Kota Bukittinggi hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung-jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Renstra ini juga menjabarkan visi Kemendikbud beserta rencana sasaran Nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di kota Bukittinggi yang hendak dicapai pada periode 2016—2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II, III dan IV di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan

demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

Bukittinggi, 01 Agustus 2021
Walikota Bukittinggi



H. Ramlan Nurmatias*